AGUSTUS 2021

EKONOMI-POLITIK PENEMPATAN MILITER DI PAPUA

KASUS INTAN JAYA

#BERSIHKAN INDONESIA
YLBHI
WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
PUSAKA untuk memberdayakan hak - hak masyarakat
WALHI PAPUA
LBH PAPUA
KontraS
JATAM Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network
GREENPEACE
TrendAsia

TIM STUDI:
Ode Rakhman, Umi Ma'rufah,
Bagas Yusuf Kausan, Ardi.

KONTRIBUTOR:
Asfinawati, Muhammad Isnur,
Ahmad Fauzi, Wahyu Perdana,
Rivanlee Anandar, Fatia Maulidiyanti,
Asep Komaruddin, Rio Rompas,
Iqbal Damanik, Ahmad Saini,
Tigor Hutapea, Wirya Supriyadi,
Emanuel Gobay, Ahmad Ashov Birry,
Merah Johansyah.

PENANGGUNGJAWAB & PENERBIT:
#BersihkanIndonesia
YLBHI
WALHI Eksekutif Nasional
Pusaka Bentara Rakyat
WALHI Papua
LBH Papua
KontraS
JATAM
Greenpeace Indonesia
Trend Asia

TATA LETAK & DESAIN:
Kakiketjil

GLOSARIUM

Industri Ekstraktif: Segala kegiatan industri yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi.

IUPK: Izin Usaha Pertambangan Khusus, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Jalan Trans-Papua: Sebuah proyek yang berisi rencana pembangunan sembilan ruas jalan yang menghubungkan Sorong dengan Merauke.

KKB: Kelompok Kriminal Bersenjata. Sebutan atau istilah dari institusi kepolisian untuk kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Hal tersebut menjadi dasar dilancarkannya "Operasi Kamtibmas dan Operasi Militer". Mengingat, yang memiliki tugas penegakan hukum adalah institusi kepolisian sebagaimana diatur pada pasal 13 huruf a dan huruf b UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

KKSB: Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata. Sebutan atau istilah dari instansi TNI untuk TPNPB. Hal ini membuat TNI dapat melakukan operasi militer selain perang untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, seturut tugas Tentara Nasional Indonesia yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Konsesi: Izin untuk membuka tambang, menebang hutan dan lain sebagainya yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak Karya: Perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.

Militer/Polisi non-organik: Militer atau polisi yang berasal dari operasi militer gabungan yang memiliki struktur kepemimpinan tersendiri.

Operasi Nemangkawi: Operasi keamanan dan ketertiban masyarakat bentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimulai sejak tahun 2018 di sembilan kabupaten di Papua.

Pelanggaran HAM berat: Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yakni kejahatan genosida dan atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

TPNPB: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sering juga disebut TPNPB-OPM.

WIUPK: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

RINGKASAN **3**

PENDAHULUAN **5**

1. Metode Kerja 6
2. Sumber Data dan Keterbatasan Data 7
3. Kedudukan Operasi Militer "Ilegal' di Papua 8
4. Sebaran Pos Keamanan Militer TNI-POLRI di Pegunungan Tengah 8

OPERASI MILITER ILEGAL DI INTAN JAYA UNTUK APA? **11**

1. Konflik Bersenjata TNI-POLRI dan TPNPB di Intan Jaya 12
2. Motif Penerjunan Militer di Intan Jaya 15
   - A. Konsesi Perusahaan di Intan Jaya 15
   - B. Bisnis Militer 17
3. Siapa yang Menjadi Korban Atas Kepentingan Militer? 19

PENUTUP **23**

Kesimpulan 23

Rekomendasi 24

DAFTAR PUSTAKA **25**

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Sebaran Pos Keamanan di Pegunungan Tengah 29

Lampiran 2. Data Korban Penembakan dan Penganiayaan Akibat Konflik Bersenjata TNI/POLRI dan TPNPB di Intan Jaya Selama Januari 2020 Hingga Maret 2021 30

RINGKASAN

Setelah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi melabeli TPNPB sebagai kelompok teroris, konflik bersenjata antara TPNPB dan aparat militer TNI semakin memanas. Penerjunan anggota militer non-organik pun berkali-kali dilakukan, bahkan sejak sebelum penetapan teroris. Meskipun Mahfud MD mengatakan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menyerang masyarakat sipil, melainkan untuk mengejar TPNPB[1], tetapi tak jarang warga Papua yang tidak bersalah justru menjadi korban kekerasan militer. Itulah yang terjadi pada setidaknya 24 warga sipil di Intan Jaya selama satu tahun ke belakang. Mereka menjadi korban kekerasan dan penembakan yang dilakukan baik oleh TNI/POLRI maupun TPNPB.

Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2020 terjadi 63 peristiwa kekerasan militer (TNI/POLRI) yang mengakibatkan 304 warga sipil di Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi korban.[2] Aparat POLRI terlibat dalam kasus kekerasan paling banyak dengan 33 kasus, sedang aparat TNI terlibat dalam kasus kekerasan sebanyak 22 kasus. Aparat gabungan TNI-POLRI sendiri terlibat dalam 8 kasus. **Serangkaian kekerasan yang melibatkan TNI-POLRI sepanjang 2020 bisa digolongkan ke dalam tiga motif: politik, ekonomi, arogansi.** Kekerasan bermotif politik paling banyak terjadi dengan 35 kasus, diikuti dengan kekerasan bermotif arogansi sebanyak 25 kasus, dan motif ekonomi sebanyak 3 kasus.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua umumnya dipicu oleh berbagai kebijakan pembangunan yang membuahkan konflik ekonomi, sosial, dan budaya. Penempatan aparat militer di berbagai titik di Papua juga seringkali membuahkan konflik yang berujung kekerasan bagi masyarakat sipil. Di samping itu, selain dipakai untuk mengamankan pembangunan atau kegiatan industri ekstraktif, penempatan aparat militer juga dilakukan guna meredam perlawanan bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau lebih khusus lagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sendiri menyampaikan bahwa pengiriman anggotanya ke wilayah Papua dan Papua Barat berkaitan dengan pengamanan terhadap operasi KKB. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di wilayah tambang emas terbesar di Indonesia yang menjadi objek vital yaitu PT Freeport Indonesia.

1 Lesmana, Agung Sandy & Ria Rizki Nirmala Sari, "Dicap Teroris, Mahfud MD Minta TNI-POLRI Tumpas Habis TPNPB Sesuai Hukum", diakses pada 17 Juli 2021 dari https://www.suara.com/news/2021/04/29/144528/dicap-teroris-mahfud-md-minta-tni-polri-tumpas-habis-tpnpb-sesuai-hukum?page=all.

2 Mawel, Benny, "PAHAM dan KontraS Papua Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 63 Kasus Kekerasan", diakses pada 17 Juli 2021 dari https://jubi.co.id/paham-dan-kontras-papua-sebut-sepanjang-2020-terjadi-63-kasus-kekerasan/.

Tanggul Barat yang menjadi muara terakhir aliran limbah tambang *(tailing)* PT Freeport yang dibuang dari pabrik pengolahan di wilayah dataran tinggi melalui sungai Ajikwa. Aliran limbah ini menyebabkan hancurnya hutan dan kawasan mangrove di muara laut wilayah hutan adat suku Kamoro. Foto: Muhammad Yamin.

Kajian cepat ini menilai bahwa operasi militer yang dilakukan di Papua merupakan upaya ilegal. Pasalnya, pengerahan pasukan militer itu tidak memiliki landasan instruksi yang seharusnya dikeluarkan oleh presiden dan disetujui DPR. Selain itu, sampai saat ini tidak diketahui secara pasti berapa banyak anggota militer yang telah ditempatkan di Papua. Surat balasan Markas Besar TNI kepada KontraS menyatakan bahwa informasi mengenai data penerjunan anggota TNI/POLRI di Papua merupakan informasi yang dikecualikan. Sementara itu, Mabes POLRI menjawab surat KontraS dengan memberi informasi berapa banyak anggota POLRI yang dikerahkan dalam operasi Nemangkawi 8 Februari - 31 Agustus 2021.

Dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik, kajian cepat ini mencoba memperlihatkan bagaimana relasi antara konsesi perusahaan dengan militer di Papua. Pada publikasi awal, kajian ini mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Kabupaten ini mengalami beragam konflik kekerasan militer, mulai dari yang bermotif perburuan KKB, maupun pengamanan konsesi perusahaan tertentu.

Dalam dua tahun terakhir, konflik bersenjata antara TNI/POLRI dengan TPNPB telah mengakibatkan setidaknya 34 korban meninggal dan luka-luka. Memanasnya konflik ini juga mengakibatkan warga lokal trauma sehingga memilih pergi dan mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman. Pengerahan aparat keamanan TNI/POLRI di Intan Jaya yang seharusnya membawa kedamaian, justru sebaliknya yakni menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi masyarakat Intan Jaya. Kajian ini—dengan mengutip pernyataan Melianus Duwitau, Koordinator Tim Penolakan Penambangan Blok Wabu—menengarai bahwa **teror ini sengaja diciptakan sebagai upaya pengusiran agar rencana perusahaan ekstraktif untuk menduduki wilayah itu dapat berjalan mulus.**

Teror ini sengaja diciptakan sebagai upaya pengusiran agar rencana perusahaan ekstraktif untuk menduduki wilayah itu dapat berjalan mulus.

Dengan dibantu kajian George Junus Aditjondro mengenai ekonomi-politik bisnis tentara di Tanah Papua, studi ini mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan militer dalam bisnis tambang ekstraktif di Intan Jaya. **Melalui analisis spasial, ditemukan empat perusahaan yang potensial diuntungkan oleh kehadiran pos keamanan TNI/POLRI di dekat konsesinya. Empat perusahaan tersebut ialah PT Freeport Indonesia dan/atau PT ANTAM, PT Madinah Qurrata 'Ain, PT Nusapati Satria, dan PT Kotabara Mitratama. Di balik jajaran penting pengurus di dua perusahaan, PT ANTAM dan PT Madinah Qurrata 'Ain, terdapat sejumlah nama purnawirawan dan prajurit aktif yang duduk sebagai komisaris atau menjadi salah satu pemegang saham. Beberapa purnawirawan teridentifikasi bahkan merupakan tim kampanye pemilihan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo.** Dua perusahaan ini juga tercatat melakukan berbagai pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat asli Papua. Karena itu, rencana penambangan Blok Wabu di Intan Jaya ditolak oleh berbagai kelompok masyarakat di Papua.

Dengan melihat situasi tersebut, kajian cepat ini merekomendasikan agar pemerintah pusat menarik seluruh anggota keamanan TNI/POLRI yang diturunkan secara non-organik, menindak tegas aparat militer yang melakukan pelanggaran HAM, dan mencabut perizinan perusahaan yang tidak mendapat persetujuan dari masyarakat Papua. Pemerintah pusat dan daerah juga harus mengutamakan keselamatan dan kedamaian di Intan Jaya dengan mengupayakan pelayanan sosial yang baik dan, tentu saja, tidak selalu menggunakan pendekatan militer dalam setiap kebijakan. ✪

PENDAHULUAN

Pada bulan April kemarin, Pemerintah Republik Indonesia resmi melabeli kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.[3] Peningkatan status dari "Kelompok Kriminal Bersenjata" menjadi teroris dilakukan tidak lama pasca peristiwa tewasnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Mayor Jenderal TNI (Anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Menyikapi peristiwa tersebut, pemerintah juga berencana akan menambah jumlah pasukan di Papua dan menggelar operasi militer.[4]

Label teroris menjadi babak baru dalam sejarah panjang operasi aparatur negara (polisi dan tentara) di Tanah Papua. Padahal, tanpa status teroris sekalipun, keberadaan militer dan polisi non-organik di Papua sudah terlampau banyak. Karena itu, rencana pemerintah tersebut justru berpotensi makin menaikkan eskalasi konflik, memperparah teror bagi masyarakat sipil, dan memperpanjang deretan kekerasan negara di Papua.

Dalam catatan Tempo & KontraS, pada tahun ini saja, paling tidak ada 2.032 aparat (TNI & POLRI) yang sudah dan akan ditempatkan di beberapa penjuru Papua untuk berbagai tujuan.[5] Sebagian besar personil (TNI & POLRI) tersebut tergabung dalam Operasi Nemangkawi periode 01 Januari-30 Juni 2021. Sebagian lain tergabung dalam pasukan pengamanan Polsek, pengamanan konflik sosial, pengamanan PT Freeport Indonesia, dan pengamanan Pilkada. Jumlah tersebut belum termasuk sekian banyak prajurit TNI yang dikirim ke Papua untuk berbagai keperluan. Misalnya, dalam satu keberangkatan saja, ada 1.350 prajurit yang sengaja dikirim untuk mengamankan perbatasan RI-Papua Nugini.[6]

Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat yang kini sedang ditangkap Satgas Nemangkawi, memaparkan jumlah yang lebih besar lagi. Menurutnya, dalam tiga bulan pertama tahun 2021 saja, ada sejumlah 3.609 prajurit TNI non-organik yang sudah dikirim ke Tanah Papua. Sementara jika dikalkulasi dalam tiga tahun terakhir, paling tidak ada sekitar 21.609 prajurit TNI yang dikirim ke Tanah Papua. Jumlah tersebut diperoleh dari berbagai data media dan pernyataan resmi dan terbuka dari negara.[7]

---

3 Nurita, Dewi Dkk, "Tak Bulat Memberi Cap Teroris", Koran Tempo 30 April 2021.

4 Rahma, Anindita Dkk, "Ancang-Ancang Operasi Militer di Papua", Koran Tempo 28 April 2021.

5 Puspitasari, Maya Ayu, "Bersiaga di Penjuru Papua", Koran Tempo 01 Mei 2021.

6 Santoso, Audrey, "2 Kapal Perang Bersandar di Jayapura, Turunkan 1.350 Prajurit TNI", diakses pada 22 Juni 2021 dari https://news.detik.com/berita/d-5486929/2-kapal-perang-bersandar-di-jayapura-turunkan-1350-prajurit-tni.

7 Belau, Arnold, "Victor Yeimo: Dalam Tiga Tahun Negara Sudah Kirim 21 Ribu Anggota ke Papua", diakses pada 22 Juni 2021 dari https://suarapapua.com/2021/03/14/victor-yeimo-dalam-tiga-tahun-negara-sudah-kirim-21-ribu-anggota-ke-papua/

Pemerintah Republik Indonesia selalu berdalih bahwa pengiriman pasukan atau operasi militer ke Tanah Papua merupakan bagian dari upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menumpas "Kelompok Kriminal Bersenjata". Kenyataannya banyak warga sipil yang kemudian menjadi korban atas kekerasan militer. Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua, mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2020 terjadi 63 peristiwa kekerasan militer yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mengakibatkan 304 warga sipil Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi korban.[8]

Aparat POLRI terlibat dalam kasus kekerasan paling banyak dengan 33 kasus, sedang aparat TNI terlibat dalam kasus kekerasan sebanyak 22 kasus. Aparat gabungan TNI-POLRI sendiri terlibat dalam 8 kasus. Kasus kekerasan melibatkan TNI-POLRI sepanjang 2020 bisa digolongkan ke dalam tiga motif, yakni motif politik, motif ekonomi, dan motif arogansi. Kekerasan bermotif politik paling banyak terjadi dengan 35 kasus, diikuti dengan kekerasan bermotif arogansi aparat sebanyak 25 kasus dan kekerasan bermotif ekonomi sebanyak 3 kasus.

Berbagai fakta tersebut tentunya membuat publik kembali bertanya, apakah benar tujuan Negara Indonesia mengirimkan pasukan keamanan di Papua adalah untuk keamanan sipil, atau justru menambah teror kekerasan? Lalu adakah kepentingan bisnis militer yang sebenarnya menyusupi setiap operasi militer yang sedang dilakukan?[9] Studi ini berupaya untuk membedah pertanyaan tersebut melalui kajian cepat dan analisis data spasial berikut ini.

1. METODE KERJA

Sejak awal, kajian cepat ini memang berangkat dari satu asumsi dasar yakni bahwa di balik rangkaian kekerasan militer selalu terselip kepentingan ekonomi. Meski demikian, asumsi dasar tersebut tidak datang dari imajinasi belaka, melainkan dari refleksi pengalaman serupa di beberapa tempat pada masa lalu. Misalnya,

Lalu adakah kepentingan bisnis militer yang sebenarnya menyusupi setiap operasi militer yang sedang dilakukan?

Otto Syamsuddin Ishak mencatat bahwa pada periode kekerasan Perang Aceh (1989-2003) banyak serdadu yang justru mendulang untung dari perdagangan ganja.[10] Pada momen Konflik Ambon, PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) justru yang banyak mendapat untung dari perdagangan peluru.[11] Dua hal tadi hanya sedikit contoh, selain itu masih banyak lagi.

Kemudian, untuk mempermudah dan memperjelas 'bisnis militer' yang dimaksud, tiga kaki bisnis militer yang pernah diintrodusir George Junus Aditjondro dapat menjadi acuan.[12] *Kaki Pertama*, bisnis institusional militer, dalam bentuk perusahaan di bawah payung aneka yayasan dan koperasi yang didirikan institusi militer atau polisi. *Kaki Kedua*, bisnis non-institusional militer, berupa perekrutan dan penempatan purnawirawan dan perwira aktif militer di berbagai perusahaan milik keluarga aparat atau konglomerat sipil. *Kaki Ketiga*, bisnis kelabu militer, cakupannya cukup luas yakni dari pemalakan, biaya proteksi dari perusahaan, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, perdagangan pekerja seks, sampai perdagangan flora dan fauna langka. Ketiga kaki bisnis militer tersebut dapat saling terhubung, saling memengaruhi, dan terjadi bersamaan di satu wilayah atau perusahaan tertentu.

Kajian cepat ini menguji asumsi dasar tersebut melalui tiga tahap berikut in:

1. Mengidentifikasi pos-pos militer (TNI-POLRI) di Papua dan mengidentifikasi lahan konsesi perusahaan di sekitar pos militer tersebut.
2. Melakukan penelusuran daring dari berbagai publikasi atau berita yang relevan.
3. Melakukan analisis berbasis data spasial lalu menarasikannya. Hasil narasi itulah yang kemudian akan membuktikan apakah asumsi dasar tersebut hanya sekadar asumsi atau malah menjadi fakta.

8 Mawel, Benny. Op.cit..

9 Makna 'bisnis militer' di sini termasuk adalah bisnis polisi dan paramiliter yang didukung negara.

10 Ishak, Otto Syamsuddin, "Ganja Aceh dan Serdadu Indonesia dalam Periode Perang Aceh 1989-2003", Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif XVII/2004, hlm. 61-82.

11 Pontoh, Coen Husain, "Bedil, Amis Darah, dan Mesiu Mengurai Keterlibatan Militer dalam Konflik Ambon", Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif XVII/2004, hlm. 121-136.

12 Aditjondro, George Junus, "Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua", Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif XVII/2004, hlm. 84-87.

Tahap pertama, tim mengkaji keberadaan perusahaan-perusahaan berbasis lahan skala besar di lima kabupaten. Ada empat sektor perusahaan yang coba diidentifikasi yakni perusahaan pemegang izin pembalakan kayu (HPH), perkebunan monokultur (HGU), kebun kayu (HTI), dan tambang (IU Pertambangan). Dalam hal ini, termasuk juga dengan menyingkap profil perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi dan mencari keterhubungannya dengan militer (TNI-POLRI) di Indonesia.

Hasil mengidentifikasi sebaran pos militer dan konsesi perusahaan tersebut kemudian ditumpang-susunkan *(overlay)* untuk melihat kedekatan jarak antar lokasi. Kajian cepat ini hanya mengidentifikasi konsesi perusahaan-perusahaan di kecamatan/distrik yang terdapat pos-pos militer. Oleh karena itu, bisa jadi ada satu perusahaan yang masuk kabupaten tertentu, tetapi tidak termasuk perusahaan yang diidentifikasi karena di distrik/kecamatan tersebut tidak ditemukan pos-pos militer di sekitarnya.

Selain itu, kajian cepat ini juga mempertimbangkan pula keberadaan akses Jalan Trans-Papua yang potensial mempercepat dan mempermudah mobilitas. Misalnya, keberadaan pos militer juga banyak yang terletak dekat Jalan Trans-Papua. Hal ini makin memudahkan mobilisasi militer untuk mendekati dan menyergap lokasi-lokasi persembunyian TPNPB. Tidak heran dalam kasus tertentu, Jalan Trans-Papua memang lebih siap untuk melayani kebutuhan TNI.[13] Kemudian riset WALHI (2021) juga menunjukkan bahwa keberadaan Jalan Trans-Papua justru potensial lebih menguntungkan perusahaan berskala besar daripada masyarakat Papua itu sendiri.[14]

Serial pertama kajian cepat kali ini akan fokus di Kabupaten Intan Jaya mengingat bahwa konflik bersenjata di wilayah ini cukup panas dalam tiga tahun terakhir.

2. SUMBER DATA DAN KELENGKAPAN INFORMASI

Kajian cepat ini dibuat berdasarkan data-data sekunder yang tersedia di internet dan beberapa laporan dari berbagai lembaga yang dapat dijangkau.

Data Penempatan Militer dalam studi ini dibangun berdasarkan dua kategori. Pertama, berdasarkan informasi mengenai sebaran kantor/pos militer, sedangkan untuk kategori yang kedua data dibangun berdasarkan informasi penerjunan/penempatan militer. *Kategori pertama*, data mengenai informasi sebaran kantor/pos militer, dibangun melalui proses pencarian di internet: media elektronik atau website resmi. Contohnya seperti melalui https://polri.go.id/ dan https://tniad.mil.id/, serta *google maps*.

Kategori kedua, data mengenai informasi penerjunan/pengiriman militer (terkait Operasi/OPS atau Pengamanan/PAM), dibangun berdasarkan surat balasan permohonan data dari MABES POLRI yang ditujukan kepada KontraS. Kedua kategori data tadi kemudian dikompilasi untuk menjadi Data Pos Penempatan Militer. Pembangunan data-data tersebut, terutama pada sumber-sumber data penempatan militer masih mengacu pada nama distrik/kecamatan.

Data konsesi yang digunakan dalam studi ini bersumber dari data yang diperoleh dari lembaga Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Tahun 2018. Data konsesi tersebut menggambarkan sebaran konsesi tambang yang ada di wilayah Pulau Papua. Meskipun data konsesi JATAM mencakup Pulau Papua, namun juga dilengkapi dengan peta konsesi Blok Wabu yang berada di Distrik Hitadipa yang dihimpun oleh PUSAKA.[15]

3. KEDUDUKAN OPERASI MILITER "ILEGAL" DI PAPUA

Kajian cepat ini menganggap bahwa keberadaan operasi militer di Papua merupakan tindakan ilegal. Dasar argumentasinya berasal dari analisis pendokumentasian pelanggaran HAM berat di Papua yang diterbitkan LBH Papua. Pada prinsipnya, kelompok TPNPB secara hukum Internasional dikategorikan sebagai "kombatan". Namun, secara hukum nasional, TPNPB diartikan oleh institusi kepolisian sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sehingga dilancarkan "Operasi Kamtibmas dan Operasi Militer".

13 Kirksey, S. Eben & Kiki van Bilsen, "A Road to Freedom: Mee Articulations and the Trans Papua Highway", diakses pada 13 Juli 2021 dari http://www.kitlv-journals.nl/

14 Tim Peneliti, Analisis Pengaruh Rencana Pembangunan Major Project Jalan Trans-Papua terhadap Aspek Sosial-Ekologis Papua, (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021).

15 Pusaka, "Peta Konsesi Pertambangan Minerba di Kabupaten Intan Jaya, Prov. Papua", diakses pada 22 Juli 2021, dari https://pusaka.or.id/2016/03/peta-konsesi-pertambangan-minerba-di-kabupaten-intan-jaya-prov-papua/.

Mengingat, yang memiliki tugas penegakan hukum adalah institusi kepolisian sebagaimana diatur pada pasal 13 huruf a dan huruf b UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, diistilahkan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) oleh instansi TNI. Hal ini membuat TNI dapat melakukan operasi militer selain perang untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, seturut tugas Tentara Nasional Indonesia yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.[16]

Perlu diketahui, Operasi Militer Selain Perang (selanjutnya disingkat OMSP) adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain. Namun, justru untuk melaksanakan tugas non-tempur seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana, dan untuk kepentingan nasional lainnya. Kemudian untuk melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, dan tugas perdamaian sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 11, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.[17]

UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI terkait pengerahan kekuatan TNI Pasal 17 menyatakan: (1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden. (2) Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan Pasal 18 (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/ atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.[18]

Namun kenyataannya, sampai saat ini, dalam setiap Operasi Penegak Hukum dan Operasi Militer di Papua, Presiden Republik Indonesia belum menerbitkan Keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR RI terkait pengerahan TNI dan pengunaan kekuatan TNI sesuai dengan ketentuan pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Inilah mengapa operasi militer yang diadakan di Papua dianggap sebagai operasi militer ilegal.[19] **Kalau demikian, mengapa Presiden tidak kunjung mengentikan pengerahan kekuatan TNI di Papua?**

Namun kenyataannya, sampai saat ini, dalam setiap Operasi Penegak Hukum dan Operasi Militer di Papua, Presiden Republik Indonesia belum menerbitkan Keputusan Presiden yang disetujui oleh DPR RI.

4. SEBARAN POS KEAMANAN MILITER TNI-POLRI DI PEGUNUNGAN TENGAH

Kajian cepat ini melakukan identifikasi pos militer (TNI-POLRI) di lima kabupaten di Kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua yakni Kabupaten Intan Jaya, Mimika, Nduga, Puncak, dan Puncak Jaya. Ada dua alasan utama mengapa kajian cepat ini memilih lima kabupaten tersebut sebagai unit analisis spasial. *Pertama*, kajian cepat ini mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir eskalasi konflik di wilayah-wilayah tersebut memang cenderung tinggi. *Kedua*, kajian cepat ini juga mencermati bahwa pengiriman aparat TNI-POLRI dari luar Papua banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah tersebut.

Pengerahan aparat militer di Tanah Papua terbagi dalam dua model, organik dan non-organik. Model satuan organik memiliki struktur seperti Koramil dan sebagainya, sedangkan non-organik yakni TNI yang berasal dari operasi militer gabungan. Mereka memiliki

16 Emanuel Gobay & Johnny T. Wakum, Pendokumentasian Kasus Pelanggaran HAM Berat dari Tahun 2018-2020, (LBH Papua-YLBHI, 2020).

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid.

struktur kepemimpinan tersendiri.[20] Satuan non-organik tersebut berasal dari luar Papua, yaitu BKO (Bawah Kendali Operasi) ke Kodam XVII. BKO sendiri bersifat sementara, artinya ada batasan waktu, biasanya paling lama satu tahun.[21]

Studi ini mengidentifikasi secara spasial berapa banyak pos keamanan militer yang ada di lima kabupaten di Pegunungan Tengah. Melalui pengamatan sekilas, tampak mayoritas pos keamanan terletak di sekitar Jalan Trans-Papua. Berikut ini adalah gambaran peta penempatan pos-pos militer tersebut.

Berdasarkan identifikasi tersebut, kantor Polres telah berdiri di tiap kabupaten. Polres Nduga dan Puncak diketahui mulai ada pada 2020. Polres di Puncak Jaya ada lebih dulu yaitu pada 2013, sedangkan di Intan Jaya pada 2019, dan Mimika tidak diketahui tahun berdirinya *(lihat Lampiran 1)*. Kemudian untuk kantor Kodim, dua kabupaten telah memiliki kantor Kodim yang telah berdiri cukup lama. Di Kabupaten Puncak Jaya dengan Kodim bernomor 1714, teridentifikasi telah berdiri sejak 2013, sedangkan Mimika dengan nomor 1710 tidak diketahui tahun berdirinya. Dengan melihat nomornya, kemungkinan Kodim Mimika berdiri lebih dulu dari Kodim Puncak Jaya. Dua kabupaten lainnya yaitu Intan Jaya dan Puncak memiliki Kodim Persiapan, sedangkan Kabupaten Nduga belum ada kantor Kodim.

Tidak diketahui berapa jumlah pasti aparat militer, baik organik dan non-organik, yang berada di Papua, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah. **DPR Papua sendiri menyatakan kesulitan untuk mendapat data dan informasi terkait berapa jumlah pasukan non organik yang dikirim di berbagai daerah Papua setiap tahun. Bahkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, kemungkinan juga tidak mengetahui jumlahnya.**[22] Demi mendapatkan informasi resmi mengenai berapa

Image 1. Peta Sebaran Pos Keamanan di Pegunungan Tengah

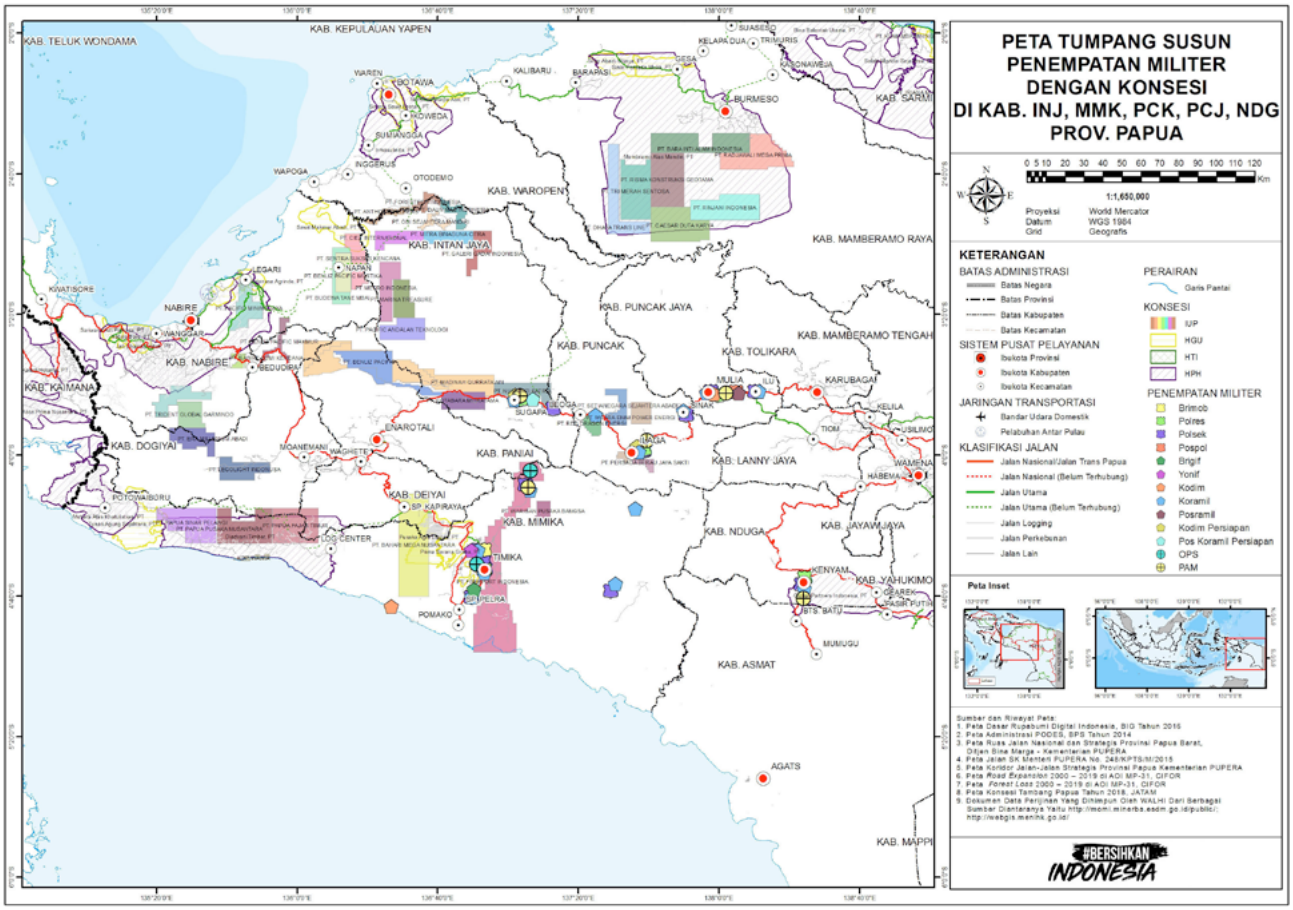

20 Adyatama, Egi, "Konflik TNI-KKB, Masyarakat Intan Jaya Banyak Mengungsi dan Trauma", diakses pada 22 Juni 2021, dari https://nasional.tempo.co/read/1400531/konflik-tni-kkb-masyarakat-intan-jaya-banyak-mengungsi-dan-trauma/full&view=ok.

21 Santoso, Aris, "Pasukan Organik dan Non-Organik Bertemu di Papua", diakses pada 22 Juli 2021 dari https://kbr.id/nusantara/0S2-2013/pasukan_organik_dan_non_organik_bertemu_di_papua/65265.html

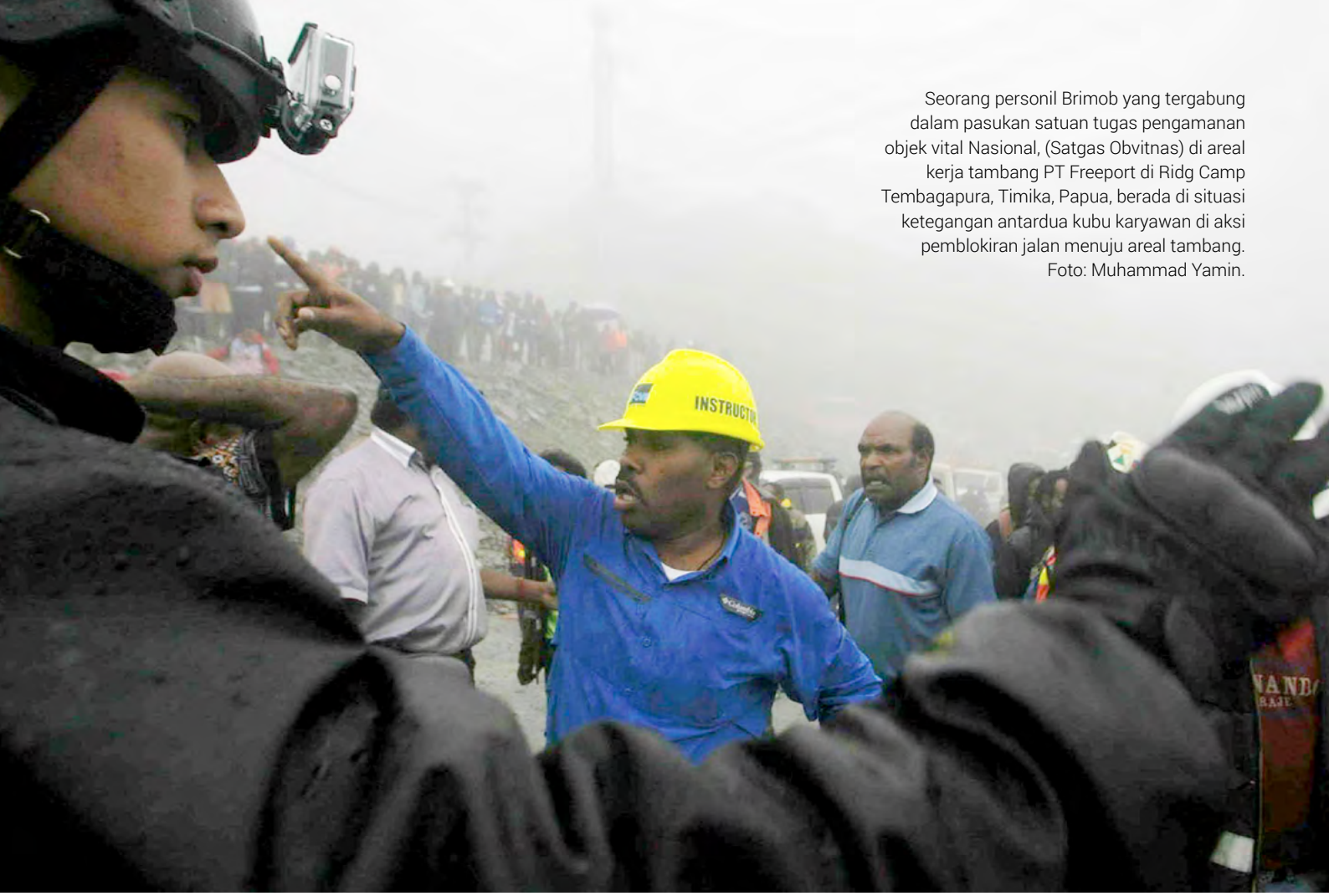

Seorang personil Brimob yang tergabung dalam pasukan satuan tugas pengamanan objek vital Nasional, (Satgas Obvitnas) di areal kerja tambang PT Freeport di Ridg Camp Tembagapura, Timika, Papua, berada di situasi ketegangan antardua kubu karyawan di aksi pemblokiran jalan menuju areal tambang. Foto: Muhammad Yamin.

banyak pasukan yang diterjunkan di Papua, KontraS pun berkirim surat ke Markas Besar TNI. Namun, data terkait pengiriman personel aparat TNI & POLRI ke Papua tidak dapat diberikan dengan alasan itu merupakan "informasi publik yang dikecualikan."

Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional KNPB, mengungkapkan bahwa dari berbagai data media dan pernyataan resmi negara (secara terbuka), jumlah TNI non-organik saja yang dikirim ke Tanah Papua dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) yaitu 21.609 personel.[23] Jumlah tersebut belum termasuk dengan jumlah pasukan organik dan POLRI di tiap titiknya. Sementara menurut data I Made Supriatma dalam risetnya, di Papua rasio penduduk dan personel keamanan per kapita adalah 97:1. Dengan kata lain, **ada satu polisi atau tentara untuk setiap sembilan puluh tujuh orang Papua. Sementara secara nasional, rasionya 1:296, berarti 1 personel keamanan untuk setiap 296 warga. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasukan keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warga di wilayah lainnya.**[24]

Ada satu polisi atau tentara untuk setiap sembilan puluh tujuh orang Papua. Sementara secara nasional, rasionya 1:296, berarti 1 personel keamanan untuk setiap 296 warga. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pasukan keamanan di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warga di wilayah lainnya.

22 Pademme, Arjuna, "DPR Papua: Sulit mencari tahu jumlah pasukan non organic di Papua", diakses pada 22 Juli 2021, dari https://jubi.co.id/sulit-mencari-tahu-jumlah-pasukan-non-organik-di-papua/.

23 Belau, Arnold, "Victor Yeimo: Dalam Tiga Tahun Negara Sudah Kirim 21 Ribu Anggota ke Papua", op.cit..

24 Supriatma, A.M.T., "TNI/POLRI in West Papua: How Security Reforms Work in the Conflict Regions", Indonesia, No. 95 (April 2013), h. 97-98.

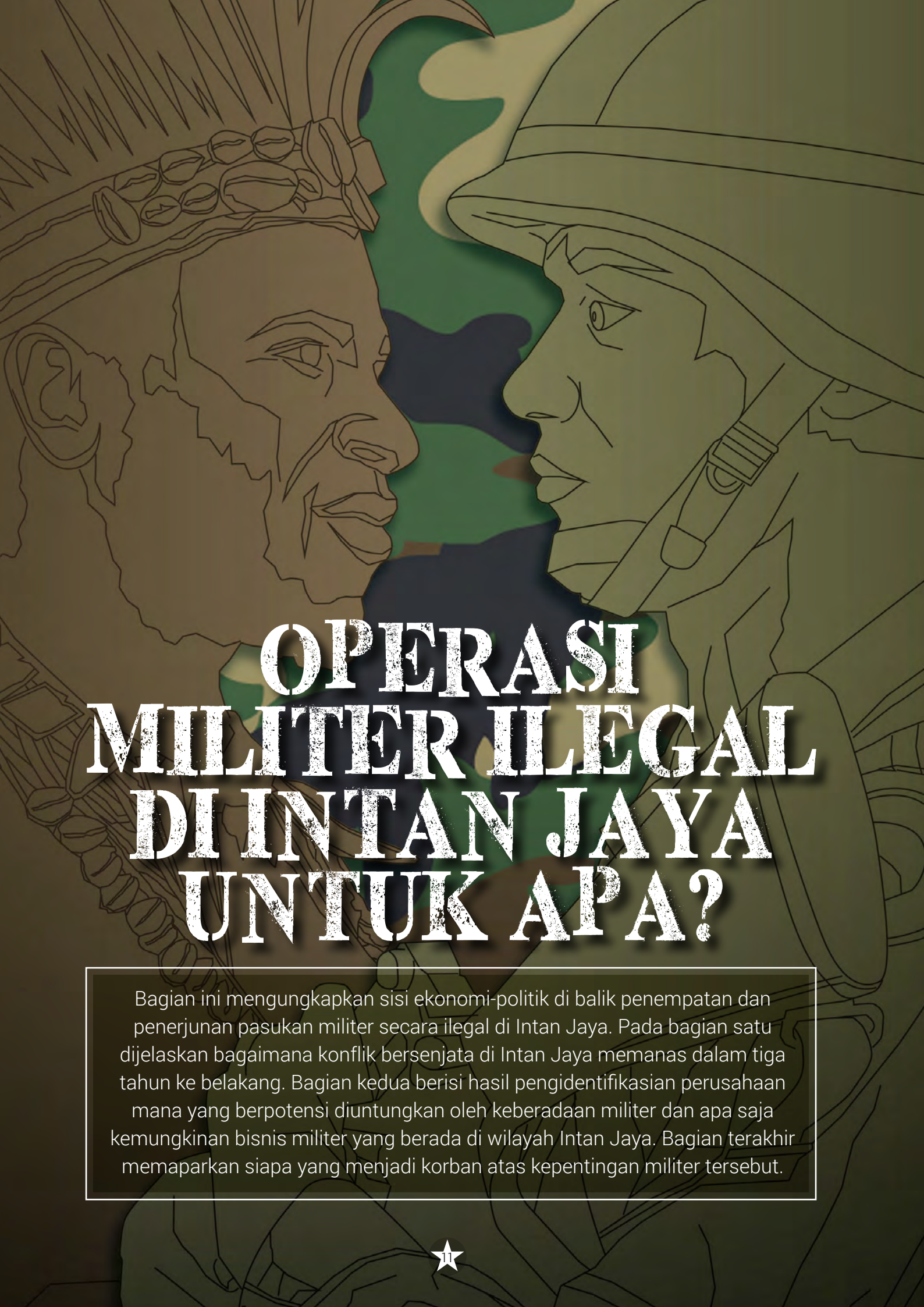

OPERASI MILITER ILEGAL DI INTAN JAYA UNTUK APA?

Bagian ini mengungkapkan sisi ekonomi-politik di balik penempatan dan penerjunan pasukan militer secara ilegal di Intan Jaya. Pada bagian satu dijelaskan bagaimana konflik bersenjata di Intan Jaya memanas dalam tiga tahun ke belakang. Bagian kedua berisi hasil pengidentifikasian perusahaan mana yang berpotensi diuntungkan oleh keberadaan militer dan apa saja kemungkinan bisnis militer yang berada di wilayah Intan Jaya. Bagian terakhir memaparkan siapa yang menjadi korban atas kepentingan militer tersebut.

1. KONFLIK BERSENJATA TNI-POLRI DAN TPNPB DI INTAN JAYA

Pada 2020 terjadi serentetan peristiwa kekerasan dan pembunuhan yang dilaporkan dilakukan baik oleh aparat militer (TNI-POLRI) Indonesia maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang diolah dari berbagai sumber, selama Januari 2020 hingga Maret 2021 telah terjadi sejumlah penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan setidaknya 34 korban, yang 24 diantaranya meninggal dunia. Dari 24 orang yang meninggal itu, 7 orang adalah anggota TNI, 2 anggota TPNPB, dan 15 dari warga sipil. Zanambani bersaudara salah satunya. Luther Zanambani dan Apinus Zanambani dilaporkan mengalami penyiksaan saat diinterogasi hingga akhirnya meninggal dunia dan mayatnya dibakar oleh oknum TNI AD. Keduanya diambil dan diinterogasi ketika rombongan TNI AD sedang melakukan penyisiran pada 21 April 2020. Kedua warga sipil tersebut awalnya dicurigai sebagai anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)—sebutan untuk TPNPB-OPM oleh TNI.[25]

Seorang pendeta yang juga saudara dari Zanambani bersaudara, Yeremia Zanambani, juga dibunuh tanpa sebab di kandang babinya di Hitadipa pada 19 September 2020. Hingga kini belum ada aparat keamanan yang diadili atas pembunuhan yang menimpa Yeremia.[26] TNI dan OPM saling tuding.[27] Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kol Czi IGN Suriastawa membuat pernyataan yang menyebut Pendeta Yeremia ditembak oleh TPNPB. "Mereka sedang mencari momen menarik perhatian di Sidang Umum PBB akhir bulan ini," katanya kepada media.[28]

Klaim tersebut dibantah laporan investigasi Tirto.id (22/09/20) yang menceritakan bahwa ketika masih dalam keadaan sakaratul maut Yeremia sempat mengatakan bahwa dia menduga pelaku penembakan adalah aparat TNI. Mengutip laporan investigasi tersebut dikatakan pada awalnya "TNI itu menuduh Yeremia yang menghabisi nyawa rekannya. Yeremia berkata ia tak pernah membunuh siapa pun." Dalam artikel lain diceritakan juga apa yang terjadi waktu itu. "Saya angkat tangan, tetapi mereka tembak saya di tangan lalu tikam saya di punggung belakang leher," tutur Yeremia kepada istrinya, Miriam.[29]

Peristiwa penembakan Yeremia terjadi bersamaan dengan pembakaran rumah Dinas Kesehatan di Distrik Hitadipa, Intan Jaya. Peristiwa ini pun tidak lepas dari insiden penembakan prajurit TNI yang sedang dalam perjalanan dari Distrik Sugapa menuju Markas Koramil Persiapan Hitadipa oleh TPNPB. Dalam insiden tersebut, seorang anggota TNI AD bernama Serka Sahlan meninggal dunia, Kamis (17/9/2020). TPNPB juga turut merampas senjata api jenis SS1 dari Serka Sahlan.[30] Dua hari setelah peristiwa penembakan itu, TNI berjaga di Pos Koramil Persiapan Hitadipa dan menduduki sekolah satu atap (STP) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja Injili Hitadipa.

Dalam aksinya pada 19 September 2020 itu, aparat TNI mengumpulkan warga sipil Hitadipa sebanyak dua kali. *Pertama*, pukul sembilan pagi di halaman Markas Koramil Persiapan Hitadipa. Warga diberi waktu dua hari untuk mengembalikan senjata yang dirampas oleh TPNPB. *Kedua*, pukul dua belas siang di halaman Gereja Imanuel Hitadipa. Kali ini disertai ancaman pembunuhan dan peringatan kepada musuh-musuh TNI, salah satunya Pendeta Yeremia. Pendeta Yeremia tidak datang dalam pengumpulan warga sebab sejak pagi telah pergi ke ladangnya di kampung kecil bernama Bomba.

Satu jam setelah pengumpulan warga, TPNPB menyerang markas Koramil Persiapan Hitadipa. Akibatnya, satu

25 CNN Indonesia, "Oknum TNI Buang Abu Jenazah Zanambani Bersaudara ke Sungai", diakses pada 17 Juni 2021 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201223185907-12-585831/oknum-tni-buang-abu-jenazah-zanambani-bersaudara-ke-sungai.

26 Pakiding, Sevianto, "Apa Kabar Kasus Pembunuhan Pdt. Yeremia dan Pewarta Gereja Katolik di Sugapa?", diakses pada 17 Juni 2021 dari https://seputarpapua.com/view/apa-kabar-kasus-pembunuhan-pdt-yeremia-dan-pewarta-gereja-katolik-di-sugapa.html/4.

27 Briantika, Adi, "Kematian Pendeta Yeremia: Cari Pembunuh Tentara, Warga Ditembak", diakses pada 20 Juni 2021 dari https://tirto.id/kematian-pendeta-yeremia-cari-pembunuh-tentara-warga-ditembak-f4YE.

28 CNN Indonesia, "TNI Sebut Pendeta Tewas Ditembak KKB Papua", diakses pada 20 Juni 2021 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200920144515-12-548604/tni-sebut-pendeta-tewas-ditembak-kkb-papua.

29 Briantika, Adi., op.cit dan Jubi.co.id, "Konflik Intan Jaya (7): Ketegasan Dijawab Permusuhan", diakses pada 20 Juni 2021 dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-7-ketegasan-dijawab-permusuhan/.

30 Jubi.co.id, "Konflik Intan Jaya (6): Kronik Kekerasan di Intan Jaya", diakses pada 20 Juni 2021 dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-6-kronik-kekerasan-di-intan-jaya/.

aparat TNI bernama Pratu Dwi Akbar Utomo tewas. TNI pun menyisir kampung untuk mengejar TPNPB hingga membakar dua dari empat rumah Dinas Kesehatan yang ditempati warga. Atas kejadian ini, delapan anggota TNI AD ditetapkan sebagai tersangka.[31]

Setelah kejadian pembunuhan Zanambani bersaudara, seorang pewarta gereja Katolik bernama Agustinus Duwitau di Distrik Sugapa juga menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan Indonesia pada 7 Oktober 2020.[32] Ia dicurigai sebagai anggota TPNPB karena membawa senapan angin dalam perjalanan menuju Emondi.

Beberapa hari setelahnya (26 Oktober 2020), Rufinus Tigau, Katekis (guru jemaat Katolik) dari Paroki Bilogai tewas ditembak oleh anggota TNI di Kampung Jalai, Intan Jaya.[33] Rufinus juga dituduh sebagai anggota TPNPB oleh aparat keamanan Indonesia. Pastor Marten Kuayo, Administrator Diosesan Keuskupan Timika telah menegaskan bahwa Rufinus adalah Katekis Stase Jalae, Paroki St. Mikael Bilogai, Intan Jaya. Rufinus tidak ada kaitannya dengan aktivitas TPNPB di Intan Jaya.[34] Selain Rufinus, seorang siswa SD YPPK St. Fransiskus Jalai berusia 12 tahun bernama Megianus Kobagau juga menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI/POLRI.

Tidak sampai di situ saja, kejadian penembakan terhadap warga sipil di Intan Jaya juga berlanjut pada tahun 2021. Dikabarkan melalui laman *jubi.co.id* (16/02/21), tiga warga Intan Jaya meninggal akibat tindak kekerasan dan penembakan oleh aparat TNI.[35] Bermula dari penyisiran yang dilakukan TNI dalam mencari pelaku penembakan anggota TNI bernama Prada Ginanjar Arianda, seorang warga bernama Janius Bagau mendapat luka tembak di lengan kiri hingga tulangnya hancur. Ia lantas dibawa ke Puskesmas Bilogai yang berada di Yokatapa, Sugapa, Intan Jaya dengan ditemani dua saudaranya, Justinus Bagau dan Soni Bagau. Malam harinya mereka didatangi oleh aparat TNI sambil disiksa dan dipukul hingga ketiganya meregang nyawa malam itu juga. Lagi-lagi, klaim bahwa yang meninggal adalah KKB disampaikan oleh pihak TNI kepada media.

Konflik bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dengan TPNPB mulai memanas sejak bulan Oktober 2019 ketika TPNPB menembak tewas tiga tukang ojek Pugisiga, Distrik Hitadipa.[36] Ketiga tukang ojek itu, Rizal (31), Herianto (31), dan La Soni (25), dicurigai sebagai mata-mata aparat keamanan. Pembunuhan ketiga tukang ojek itu pun mempercepat pembentukan komando teritorial baru TNI di Intan Jaya.[37]

Dalam dua kali baku tembak antara TPNPB dengan TNI pada 7 November 2020 dan 22 Januari 2021, empat anggota TNI meninggal dunia.[38] Selain TNI, korban penembakan TPNPB tidak jarang juga menimpa warga sipil seperti nasib ketiga ojek sebelumnya. Laporan tim kemanusiaan yang dipublikasi *Jubi.co.id* juga menyebutkan beberapa peristiwa penembakan yang dialami oleh warga sipil. Pada 22 Mei 2020, TPNPB menembak dua tenaga medis Dinas Kesehatan Intan Jaya, Heniko Somou dan Alemanek Bagau di Kampung Kititapa, Distrik Wandai. Pada 14 September 2020, TPNPB menembak La Ode Anas, seorang warga sipil yang tengah menjalani perawatan luka tembak di Puskesmas Yokatapa di Sugapa. Pada hari yang sama seorang tukang ojek bernama Fathur Rahman juga ditembak oleh TPNPB usai mengantar penumpang dari Kampung Titigi ke Distrik Sugapa.[39] Dan pada tahun 2021, seorang penjaga kios di Tigamajigi, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa ditembak tentara Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berada di Intan Jaya, Papua.[40]

31 Taher, Andrian Pratama, "8 Personel TNI Tersangka Pembakaran Rumah Dinas Kesehatan Hitadipa", diakses pada 22 Juni 2021 dari https://tirto.id/8-personel-tni-tersangka-pembakaran-rumah-dinas-kesehatan-hitadipa-f6Wg.

32 Lantipo, Yuliana, "Seorang Pewarta Gereja Tertembak di Intan Jaya, Papua", diakses pada 17 Juni 2021 dari https://jubi.co.id/seorang-pewarta-gereja-tertembak-di-intan-jaya-papua/.

33 Mambor, Victor, "Keuskupan Timika Rilis Kronologis Penembakan Rufinus Tigau, Katekis dari Paroki Bilogai", diakses pada 27 Juni 2021 dari https://jubi.co.id/keuskupan-timika-rilis-kronologis-penembakan-rufinus-tigau-katekis-dari-paroki-bilogai/.

34 Jubi.co.id, "Administrator Diosesan Keuskupan Timika: Rufinus Tigau Adalah Katekis di Paroki Jalae Timika", diakses pada 27 Juni 2021 dari https://jubi.co.id/papua-rufinus-tigau-katekis-di-paroki-jalae-timika/.

35 Mambor, Victor, "Tiga Warga Intan Jaya Tewas, Diduga Akibat Kekerasan Anggota TNI", diakses pada 18 Juni 2021 dari https://jubi.co.id/tiga-orang-warga-intan-jaya-papua-tewas-diduga-akibat-kekerasan-anggota-tni/.

36 Mambor, Victor, "Konflik Intan Jaya (5): Konflik Bersenjata Baru yang Mematikan, diakses pada 20 Juni 2021 dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-5-konflik-bersenjata-baru-yang-mematikan

37 Mambor, Victor, "Konflik Intan Jaya (5): Konflik Bersenjata Baru yang Mematikan", op.cit.

38 Maulana, Riezky, "Baku Tembak dengan KKB di Intan Jaya, Dua Prajurit TNI Gugur", diakses pada 5 Juli 2021 dari https://nasional.sindonews.com/read/310478/14/baku-tembak-dengan-kkb-di-intan-jaya-dua-prajurit-tni-gugur-1611309708.

39 Jubi.co.id, "Konflik Intan Jaya (6): Kronik Kekerasan di Intan Jaya", op.cit.

40 Belau, Arnold, "Breaking News: TPNPB Tembak Satu Orang di Bilogai, Intan Jaya", op.cit.

Sebuah jalan memotong langsung melalui petak hutan hujan terisolasi yang dikelilingi oleh deretan kayu gelondongan di konsesi kelapa sawit PT Internusa Jaya Sejahtera (PT IJS), bagian dari grup Internusa 1 April 2018.
Foto: Ulet Ifansasti/Greenpeace

2. MOTIF PENERJUNAN MILITER DI INTAN JAYA

Intan Jaya merupakan satu dari empat kabupaten di Pegunungan Tengah Papua yang menjadi lokasi pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) baru. Tiga kabupaten lainnya ialah Kabupaten Deiyai, Paniai, dan Puncak.[41] Kodim baru Intan Jaya terletak di ibukota kabupaten yaitu Distrik Sugapa. Selain markas Kodim, berdasarkan pantauan citra satelit, di Sugapa juga terdapat dua markas polisi yaitu Polres Intan Jaya dan Polsek Sugapa. Di Hitadipa, TNI juga mulai membentuk markas Koramil Persiapan dengan cara menduduki SD YPPGI dan SMP Satu Atap Hitadipa.

Terhitung sejak November 2019, pengiriman pasukan ke Intan Jaya dalam jumlah besar mulai gencar dilakukan. Penambahan pasukan dalam skala yang signifikan terjadi di Intan Jaya sejak pertengahan Desember 2019, dengan tiga helikopter yang disiagakan di lapangan terbang Soko Paki, Bilogai. Warga di Sugapa bersaksi pada 14 Desember 2019 pukul 18.00 WIT sebuah helikopter terbang berputar-putar di atas wilayah Yokatapa dan Bilogai di Sugapa.[42]

Berdasarkan surat jawaban yang diterima KontraS, POLRI mengirim sejumlah 100 pasukan keamanan polisi untuk bertugas di Sugapa mulai tanggal 18 Februari hingga 31 Agustus 2021. Tujuan yang tertulis adalah guna pengamanan konflik sosial. Namun tidak jelas konflik sosial apa yang dimaksud. Penambahan jumlah aparat yang ditempatkan di Intan Jaya ini justru memicu konflik bersenjata antara TNI-POLRI dengan TPNPB semakin panas. Akibat ekskalasi konflik yang terus meningkat ini, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni dan pegawainya dikabarkan mengungsi ke Kabupaten Nabire dan meninggalkan kantor mereka di Boligai, Sugapa, Intan Jaya. Mereka meninggalkan 655 warga yang mengungsi di kompleks pastoran gereja Katolik Bilogai.[43]

Meskipun demikian, **pemerintah pusat melalui Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramowardhani, tetap bersikukuh akan terus melakukan pendekatan militeristik untuk mengamankan Papua dari KKB.**[44] **Penegasan semacam itu justru makin menimbulkan kecurigaan bahwa pendekatan kekerasan atau militeristik di wilayah konflik memang bukan soal penyelesaian masalah, tapi soal ceruk ekonomi. Apalagi di banyak tempat, tren kodamisasi—dalam konteks Sugapa adalah koramilisasi—memang acap diperuntukkan bagi bisnis militer terkait aset-aset sumber daya alam. Bahkan mungkin juga sekaligus sebagai bentuk lain dari rencana militer untuk melanggengkan konflik di daerah yang kaya sumber daya alam.**[45] Oleh sebab itu, menjadi makin penting untuk melihat keberadaan sumber daya alam atau konsesi perusahaan di sekitar wilayah konflik: Kabupaten Intan Jaya.

A. Konsesi Perusahaan Di Intan Jaya

Ada empat perusahaan yang teridentifikasi dalam kajian cepat kali ini. *Pertama*, PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan). Sebenarnya wilayah utama konsesi perusahaan ini terletak di Kabupaten Mimika. Namun, sudah sejak lama PTFI melakukan eksplorasi emas di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Lokasi tersebut merupakan bagian dari Kontrak Karya (KK) II PTFI tahun 1991 yang lebih lazim dikenal dengan nama Blok Wabu. Pada 2015, PTFI mengembalikan Blok Wabu ke pemerintah pusat sebagai bagian dari kesepakatan negosiasi IUPK. Kini sejumlah 51,23% saham PTFI dimiliki oleh perusahaan *holding* industri pertambangan Indonesia yakni MIND ID. Selain PTFI, beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari MIND ID adalah PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk.

Pada 22 September 2020, Menteri BUMN, Erick Thohir, telah bersurat ke menteri ESDM agar memberikan pengelolaan Blok Wabu kepada PT ANTAM. Tak lama kemudian, Direktur Utama *Holding* BUMN Tambang (MIND ID) juga menyatakan jika Gubernur Papua meminta penambangan Blok Wabu dilakukan dengan melibatkan BUMD.[46] Hal itu diperkuat dengan

41 Anonim, op.cit.

42 Jubi.co.id, "Konflik Intan Jaya (6): Kronik Kekerasan di Intan Jaya", op.cit.

43 Taher, Andrian Pratama, op.cit.

44 Ibid.

45 Malik, Ichsan, op.cit.

46 Mambor, Victor, "Konflik Intan Jaya (4): Gunung Emas di Sugapa dan Topografi Konflik Papua", diakses pada 13 Juli 2021 dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-4-gunung-emas-di-sugapa-dan-topografi-konflik-papua/.

Perwakilan West Wits Mining berbicara kepada orang Papua di Degeuwo pada tahun 2013 (sebelum perjanjian dengan PT TRS).

keberadaan salinan surat bertanda tangan Gubernur Papua yang berisi dukungan dan merekomendasikan WIUPK Blok Wabu seluas 40 ribu hektar kepada MIND ID. Lahan konsesi Blok Wabu berdekatan dengan pos militer Koramil Persiapan Hitadipa.

Dari hasil eksplorasi PTFI di Blok Wabu, terungkap bahwa ada cadangan emas lebih dari 116 juta ton bijih. Kandungan mineral dari tiap bijih rata-rata 2,16 gram emas dan 1,76 gram perak. Dengan kata lain, potensi emas di Blok Wabu setara dengan 8,1 juta ton emas. Sejak awal TPNPB sudah menyatakan sikap untuk menolak rencana penambangan Blok Wabu. Mereka juga meminta kepada Gubernur Papua untuk menarik kembali surat rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Nomor 540/11625/SET yang dikeluarkan di Jayapura pada 24 Juli 2020.[47]

Perusahaan *kedua* adalah PT Madinah Qurrata 'Ain (IU Pertambangan). Perusahaan dengan konsesi 23.150 ha tersebut masih dalam tahap eksplorasi emas. Sebelumnya perusahaan ini dimiliki oleh dua orang yakni Hj. Dasril dan H. Ason. Perusahaan ini kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Australia, West Wits Mining.[48] Namun belakangan West Wits Mining justru menjadi pemilik sejumlah 64% saham di Madinah Qurrata 'Ain.[49] Pada 2016, West Wits Mining juga memberikan sejumlah 30% sahamnya kepada Tobacom Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera—anak perusahaan Toba Sejahtera Group—sebagai bentuk perjanjian aliansi bisnis.[50] Lahan konsesi MQ berdekatan dengan beberapa pos militer seperti Polsek Sugapa, Polres Intan Jaya, dan Kodim Persiapan Intan Jaya.

Perusahaan *ketiga* adalah PT Nusapati Satria (IU Pertambangan). Izin konsesinya terbit pada 2011 dengan luas mencapai 25.170 ha. Perusahaan ini masih tahap eksplorasi emas dan terletak sangat dekat dengan perkampungan di Distrik Sugapa. Bahkan lokasi konsesi perusahaan ini juga berdekatan pos militer Polsek Sugapa, Polres Intan Jaya, dan Kodim Persiapan Intan Jaya.

Perusahaan *keempat* adalah PT Kotabara Mitratama (IU Pertambangan). Secara administratif sebenarnya perusahaan ini terletak di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Namun, lokasi perusahaan seluas 40.116 hektar tersebut berada persis di perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan terlewati langsung Jalan Trans-Papua. Izin PT Kotabara Mitratama terbit pada 2010 melalui Keputusan Bupati Paniai No. 017.

47 Mambor, Victor, "Konflik Intan Jaya (1): Resiko Kekerasan yang Lebih Meluas di Masa Mendatang", diakses pada 13 Juli 2021 dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-i-resiko-kekerasan-yang-lebih-meluas-di-masa-mendatang/.

48 Staf Publikasi dan Informasi Yayasan Pusaka, "Selayang Pandang Tambang Degeuwo Papua", diakses pada 13 Juli 2021 dari https://pusaka.or.id/2014/06/selayang-pandang-tambang-degeuwo-papua/

49 Adeeb, Maryam, "West Wits to dilute Derewo River gold project stake to 10%", diakses pada 10 Juli 2021 dari https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/h83XV_d8YsnCvutsor71Sw2.

50 Greenpeace International, Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua (terj.), (Amsterdam: Greenpeace International, 2021); dan Adeeb, Maryam., Ibid.

B. Bisnis Militer

Tidak semua perusahaan yang diidentifikasi di Kabupaten Intan Jaya memiliki keterkaitan dengan aparat militer (TNI/POLRI). Dua perusahaan yang tidak berkaitan tersebut ialah PT Nusapati Satria (NS) dan PT Kotabara Mitratama (KM). Pemilik perusahaan tambang KM merupakan bekas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Kementerian Energi Sumber Daya Mineral) medio tahun 1983-1992 yakni Sahat Parulian Pasaribu.[51] Sahat juga tercatat menjadi Direktur Utama PT Bona Mitra Property dan komisaris di PT Indexim Coalindo.[52] Sementara untuk NS tidak banyak data yang dapat ditemukan.

Dua perusahaan lainnya yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata 'Ain (MQ) disinyalir punya hubungan dengan aparat militer. Pada kasus MQ, kajian cepat ini mencatat bahwa terdapat paling tidak tiga nama aparat yang bersinggungan dengan perusahaan tersebut yakni Purnawirawan Polisi Rudiard Tampubolon (RT), Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan (LBP). RT merupakan komisaris perusahaan MQ, bahkan West Wits Mining (pemegang saham MQ) menganggap bahwa kepemimpinan dan pengalaman RT cukup

Image 2. Peta Sebaran Pos Militer dengan Konsesi Perusahaan di Kabupaten Intan Jaya

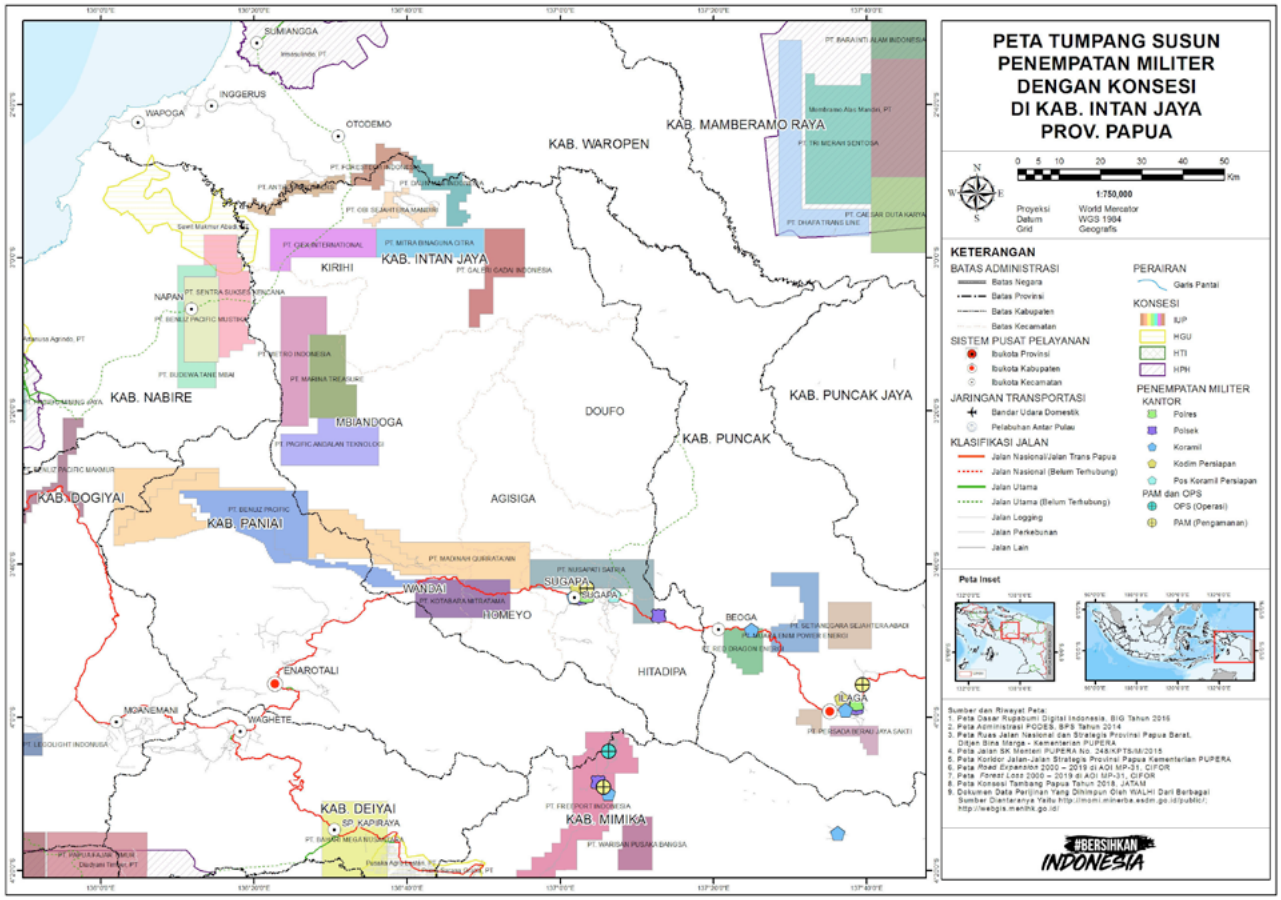

51 Utomo, Samiyo, "Gagal Menjadi Montir Mesin, Malah Jadi Pengusaha yang Sukses", diakses pada 21 Juli 2021 dari http://alumni.upnyk.ac.id/index.php/blog/2011/11/gagal-menjadi-montir-mesin-malah-jadi-pengusaha-yang-sukses.-i.

52 Lihat: (1) https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/3489?jp=3; dan (2) Anonim, "Ir. Sahat P. Pasaribu, M.Pdk Tokoh Masyarakat yang Visioner, Peduli dan Cerdas", diakses pada 21 Juli 2021 dari https://www.narwastu.id/2020/06/ir-sahat-p-pasaribu-m-pdk-tokoh-masyarakat-yang-visioner-peduli-dan-cerdas.php.

berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi pertambangan.[53] Selain duduk sebagai komisaris, perusahaan yang dipimpin RT yakni PT Intan Angkasa Aviation juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Qurrata 'Ain.[54]

Dalam *Darewo River Gold Project*, West Wits Mining juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacom Del Mandiri (TDM). Presiden direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, West Wits Mining jelas menyebut bahwa TDM bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek.[55] TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group. Pemilik saham minoritas Toba Sejahtera adalah Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MQ, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan (Bravo Lima) pemenangan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019.[56]

Pada kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat lima aparat militer (TNI/POLRI). Kelima nama tersebut berasal dari tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah *holding* perusahaan tambang Indonesia yaitu MIND ID.[57] Dalam entitas PTFI sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian (HS) sebagai komisaris PTFI. Pada 2015-2017, HS pernah menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Papua. HS juga tercatat tergabung dalam tim relawan (Cakra 19) pemenangan Presiden Jokowi pada 2019.[58]

Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap lahan konsesi PTFI (Blok Wabu) yang dikembalikan ke Pemerintah Indonesia adalah PT ANTAM. Kajian cepat ini mencatat ada dua nama aparat militer di ANTAM yakni Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo. Di ANTAM, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Sunarwibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Sunarwibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh MIND ID ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisa Strategis Badan Intelijen Negara.

Keberadaan purnawirawan dan anggota aktif aparat militer (TNI/POLRI) di perusahaan merupakan bentuk bisnis militer *kaki kedua*. Karena itu, sulit untuk tidak menduga bahwa ada kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bukan sebuah kebetulan mereka duduk di berbagai posisi penting di perusahaan-perusahaan tersebut. Besar kemungkinan mereka memang dipersiapkan untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi di balik serangkaian parade kekerasan negara di Intan Jaya. Hal ini sesuai dengan alasan yang disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir, ketika ditanya alasan menempatkan banyak aparat di BUMN, terutama yang berbasis industri pertambangan. Erick menjelaskan, "di pertambangan kadang ada konflik baik namanya soal tanah. Baik namanya perizinan yang tumpang tindih ada juga isu sosial pada masyarakat kita".[59]

Misalnya, pada kasus pengiriman ratusan pasukan tambahan (POLRI) ke Papua pada 8 Maret - 6 September 2021. Alasan pengiriman tersebut sangat spesifik yakni pengamanan obyek vital PT

53 Lihat: (1) West Wits Mining, "ASX Announcement and Media Release (Friday, 30 October 2015)", diakses pada 21 Juli 2021 dari https://westwitsmining.com/; dan (2) Pademme, Arjuna, "Demi Emas di Papua, Perusahaan Halalkan Segala Cara", diakses pada 21 Juli 2021 dari https://jubi.co.id/demi-emas-di-papua-perusahaan-halalkan-segala-cara/.

54 West Wits Mining, "ASX Announcement and Media Release (Wednesday, 12 October 2016)", diakses pada 21 Juli 2021 dari https://westwitsmining.com/.

55 Ibid.

56 Yurike, "Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi Resmi Mendeklarasikan Ormas Pejuang Bravo Lima(PBL)", diakses pada 21 Juli 2021 dari https://sorotjakarta.com/2020/02/03/jendral-tni-purn-fachrul-razi-resmi-mendeklarasikan-ormas-pejuang-bravo-limapbl/.

57 Informasi terkait komisaris PT MIND ID, PT ANTAM, dan PTFI didapat dari laman resmi perusahaan yakni https://mind.id; https://www.antam.com/en; dan https://ptfi.co.id/.

58 Kumparan, "Bravo-5 dan Cakra 19, Pasukan Jenderal Purn TNI di Belakang Jokowi", diakses pada 21 Juli 2021 dari https://kumparan.com/kumparannews/bravo-5-dan-cakra-19-pasukan-jenderal-purn-tni-di-belakang-jokowi-1534995728310430493/full.

59 Umah, Anisatul & Monica Wareza, "Rangkul TNI Hingga POLRI di BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir", diakses pada 22 Juli 2021 dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20200612141332-17-164941/rangkul-tni-hingga-polri-di-bumn-ini-jawaban-erick-thohir.

Freeport Indonesia. Tampaknya, alasan keamanan pula yang menjadi dasar mengapa West Wits Mining menyisihkan 30% saham PT MQ untuk Toba Del Lestari. Begitu pula dengan alasan PTFI menempatkan Hinsar Siburian sebagai Komisaris. Bagaimanapun Hinsar merupakan mantan Pangdam XVII/Cendrawasih. Ia sangat paham isu keamanan di Tanah Papua. Apalagi mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III yang meliputi wilayah Maluku dan Papua, Ganip Warsito, adalah rekan Hinsar di Akademi Militer angkatan 1986. Kesamaan angkatan pendidikan potensial membuat kedekatan dan koordinasi dapat terbangun lebih baik. Kogabwilhan III merupakan satuan komando utama operasi, sebuah satuan baru yang langsung berada di bawah komando Panglima TNI. Satuan ini nyaris selalu menjadi juru bicara terkait konflik kekerasan di Tanah Papua, termasuk di sekitaran konsesi PTFI.

3. SIAPA YANG MENJADI KORBAN ATAS KEPENTINGAN MILITER?

Korban langsung dari adanya konflik bersenjata antara aparat militer TNI/POLRI dengan TPNPB tentu adalah masyarakat sipil. Tuduhan bahwa mereka adalah KKB oleh TNI/POLRI, atau mata-mata keamanan oleh TPNPB, seringkali jadi dalih penembakan dan penganiayaan. Maka tak heran, sejumlah korban yang terbunuh dalam konflik bersenjata di Intan Jaya ini adalah dari kalangan warga sipil. Bahkan anak-anak pun jadi korban salah tembak. Tentu ketakutan dan trauma menghantui seluruh masyarakat Intan Jaya. Hal ini berdampak pada terjadinya kasus pengungsian. **Menurut pemerintah Kabupaten Intan Jaya, ada 1.237 orang masyarakat sipil yang terdata sebagai pengungsi, termasuk di dalamnya 331 orang perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri ke Nabire karena takut jadi korban salah sasaran dari baku tembak TNI/POLRI dengan TPNPB-OPM.**[60]

Apa yang terjadi di Intan Jaya—kekerasan, penembakan, pembunuhan, perampasan lahan, dan kerusakan lingkungan hidup—dapat dipahami sebagai ekses dari adanya kepentingan militer. Kepentingan militer ini terdiri dari dua spektrum: ekonomi dan politik. Di dalam aspek ekonomi, kepentingan militer dapat dilihat dalam kaitannya dengan keberadaan investasi skala besar

Menurut pemerintah Kabupaten Intan Jaya, ada 1.237 orang masyarakat sipil yang terdata sebagai pengungsi, termasuk di dalamnya 331 orang perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri ke Nabire karena takut jadi korban salah sasaran dari baku tembak TNI/POLRI dengan TPNPB-OPM.

yang memanfaatkan jasa pengamanan atau justru menempatkan orang-orang tertentu dari tubuh militer di dalam jajaran perusahaan. Di aspek politik, militer Indonesia berkepentingan untuk mempertahankan wilayah teritori mereka di Papua sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara membasmi TPNPB.

Dua perusahaan tambang emas yang memegang izin eksplorasi di Intan Jaya, PT Madinah Qurrata 'Ain dan PT ANTAM (Blok Wabu), merupakan contoh perusahaan yang terindikasi kuat mendapat fasilitas pengamanan dari pihak TNI & POLRI. Menurut catatan LPMA SWAMEMO (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Swalani, Mee, dan Moni), dampak yang timbul akibat hadirnya perusahaan penjarah emas ini (PT Madinah Qurrata 'Ain) antara lain:

1. Pelanggaran HAM (Penembakan);
2. Pengerusakan lingkungan hidup;
3. Pengambilan dan perampasan kekayaan alam khususnya emas; dan
4. Menularnya penyakit sosial HIV dan AIDS.[61] Dalam konteks peningkatan kasus HIV - AIDS, tentu banyak faktor lain yang dapat menjadi pemicu. Namun begitu, aktivitas pertambangan memang telah banyak dikaitkan dengan kehadiran aktivitas prostitusi yang menjadi salah satu faktor pemicu peningkatan kasus HIV-AIDS, termasuk di Papua.

LPMA SWAMEMO merupakan komunitas adat di sepanjang Sungai Degeuwo dan umumnya wilayah Meepago yang meliputi Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya yang berjuang bersama demi menggapai keadilan.[62]

60 Emanuel Gobay & Johnny T. Wakum, op.cit.

61 Staf Publikasi dan Informasi Yayasan Pusaka, op.cit.

62 Ibid.

Sejumlah anak Papua melintas di tanggul di kawasan pembuangan limbah tambang *(tailing)* milik Freeport McMoran di Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Foto: Albertus Vembrianto.

Keberadaan perusahaan Madinah Qurrata 'Ain dinilai ilegal oleh masyarakat adat setempat. Namun perusahaan tersebut acap menggandeng pihak kepolisian untuk mengamankan wilayah tambangnya. Seorang warga bernama Natalia Kobogau mengaku pernah dihalangi ketika hendak mendesak penghentian aktivitas perusahaan tambang tersebut. Suatu kali, Natalia bersama Paitua Welly Magai naik ke lokasi 45 dan 99 untuk menghentikan aktivitas PT Madinah Qurrata 'Ain. Namun pada saat yang sama, pihak PT Madinah Qurrata 'Ain bersama rombongan Kapolres Nabire juga naik dan melarang mereka untuk menghentikan aktivitas perusahaan PT Madinah Qurrata 'Ain di Degeuwo.[63] Karena praktik para pencuri emas sering dibekingi aparat, maka warga yang berani bersuara pun sering mengalami intimidasi, diskriminasi, bahkan penyiksaan.[64]

Pengamanan terhadap wilayah pertambangan emas Blok Wabu pun kemungkinan akan memberikan dampak yang sama, bahkan lebih buruk. Pasalnya, Blok Wabu merupakan bekas konsesi PT Freeport

Dengan menggandeng aparat keamanan TNI/POLRI, PT Freeport Indonesia seolah tak segan-segan menghabisi nyawa siapa saja yang dianggap mengganggu usahanya.

Indonesia yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada PT ANTAM. Dalam kasus PT Freeport Indonesia (PTFI) sendiri, telah banyak korban yang jatuh demi mengamankan wilayah tambangnya. **Dengan menggandeng aparat keamanan TNI/POLRI, PT Freeport Indonesia seolah tak segan-segan menghabisi nyawa siapa saja yang dianggap mengganggu usahanya. Seperti yang menimpa Eden Armando Debari (20) dan Ronny Wandik (23) pada 13 April 2020. Dua pemuda ini hanya ingin mancing dan memanah ikan menggunakan senapan ikan di sekitar area PT Freeport Indonesia. Namun naas, keduanya langsung ditembak mati oleh aparat militer tanpa tahu apa kesalahan yang mereka perbuat.**[65]

63 Ibid.

64 Montesori, Jeis, "Pencurian Emas Sungai Degeuwo di Papua Rugikan Negara Triliunan", diakses pada 12 Juli 2021 dari https://www.beritasatu.com/nasional/355269/pencurian-emas-sungai-degeuwo-di-papua-rugikan-negara-triliunan.

65 Gunadha, Reza, "Dua Warga Papua Ditembak Mati Aparat Saat Mancing Ikan, Satu Mahasiswa UMN", diakses pada 19 Juli 2021 dari https://www.suara.com/news/2020/04/15/181107/dua-warga-papua-ditembak-mati-aparat-saat-mancing-ikan-satu-mahasiswa-umn?page=all.

Di aspek lingkungan, tentu dampak dari aktivitas perusahaan yang memulai operasinya sejak 1967 ini sudah sedemikian parah. Apalagi diberitakan bahwa limbah tambang alias *tailing* PTFI ternyata tidak dikelola dengan baik. Menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis pada 2017, kerusakan lingkungan akibat pertambangan PTFI adalah karena tidak layaknya penampungan *tailing* di sepanjang Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai Rp10,7 triliun, muara sekitar Rp8,2 triliun, dan Laut Arafura Rp166 triliun. Pelanggaran serius terjadi karena area penampungan *tailing* sebetulnya telah dibatasi hanya 230 kilometer persegi di wilayah hulu, tapi merembes hingga ke muara sungai.[66]

Cerita soal penyingkiran masyarakat adat Kamoro dan Amungme yang menduduki wilayah Timika, khususnya di Tembagapura, tentu sudah jamak diketahui oleh publik. Namun, seolah tidak belajar dari pengalaman itu, kini hal serupa juga tengah mengancam Marga Belau, Japugau, dan Sondegau. Tiga marga ini merupakan masyarakat Papua yang mendiami wilayah Blok Wabu, Intan Jaya. Menurut P. Marthen E. Kuayo, Administrator Diosesan Keuskupan Timika, jika perusahaan itu masuk di Wabu maka akan dikemanakan orang asli Intan Jaya. Pasalnya, hanya di daerah itu saja orang asli bisa bertahan hidup seperti bertani dan berburu.[67] Karena itulah Keuskupan Timika mendesak pemerintah untuk mencabut WIUPK Blok Wabu yang telah diberikan kepada PT MIND ID.

Tidak hanya Keuskupan Timika yang menolak rencana pertambangan di Blok Wabu, Victor Yeimo, juru bicara internasional KNPB, juga menegaskan bahwa masyarakat Papua menentang pertambangan itu (7/11/2020). Sebelumnya, Melianus Duwitau, koordinator Tim Penolakan Penambangan Blok Wabu Intan Jaya menyatakan bahwa konflik berkepanjangan di Intan Jaya merupakan proses terstruktur negara untuk mengamankan kepentingan kapitalis dan mempermudah masuknya investor. Melalui media *suarapapua.com*, Melianus menyampaikan, **"sebenarnya pendropan militer secara besar-besaran dan kemudian bikin banyak kasus kekerasan terhadap warga sipil, hamba Tuhan, pemerkosaan, semua itu supaya rakyat trauma dan investor mudah masuk untuk keruk emas. Semua sedang ikuti ini. Negara harus tarik pasukan dari Intan Jaya".**[68] Dengan demikian, pengungsian sebagai akibat logis dari memanasnya konflik militer di Intan Jaya ditengarai juga merupakan upaya pengusiran masyarakat agar rencana perusahaan ekstraktif untuk menduduki wilayah tersebut dapat berjalan mulus.

"Sebenarnya pendropan militer secara besar-besaran dan kemudian bikin banyak kasus kekerasan terhadap warga sipil, hamba Tuhan, pemerkosaan, semua itu supaya rakyat trauma dan investor mudah masuk untuk keruk emas. Semua sedang ikuti ini. Negara harus tarik pasukan dari Intan Jaya".

Suara penolakan juga muncul dari Pusat Pengendalian Masyarakat Adat Pengunungan Tengah Papua (P2MA-PTP), selaku pemilik hak sulung atau hak ulayat lokasi tambang emas Blok Wabu. Agustinus Somau, kepala suku P2MA-PTP, menyatakan bahwa selaku pemilik hak ulayat mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan tambang. Di samping itu, masyarakat juga mengenal Hitadipa sebagai tanah suci, tanah misi gereja yang tidak boleh terjadi praktik kekerasan. "Mereka sangat mengharapkan untuk TNI dan pasukan organik maupun non organik tidak ada lagi di Hitadipa," kata Kepala Bidang KPKC Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, Pendeta Dora Balubu kepada media.[69] Namun sayangnya, baik Pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat, bersikukuh untuk terus melanjutkan rencana tersebut.[70]

66 Anonim, "Menanggung Dampak Limbah Freeport", diakses pada 19 Juli 2021 dari https://kolom.tempo.co/read/1169527/menanggung-dampak-limbah-freeport/full&view=ok.

67 You, Abeth, "Keuskupan Timika Minta Gubernur Papua Cabut Rekomendasi WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya", diakses pada 19 Juli 2021 dari https://jubi.co.id/keuskupan-timika-minta-gubernur-papua-cabut-rekomendasi-wiupk-blok-wabu-di-intan-jaya/.

68 You, Markus, "Rakyat Papua Tolak Investor Eksploitasi Blok B Wabu Intan Jaya", diakses pada 19 Juli 2021 dari https://suarapapua.com/2020/11/07/rakyat-papua-tolak-investor-eksploitasi-blok-b-wabu-intan-jaya/.

69 Adyatama, Egi, op.cit.

70 You, Abeth, op.cit.

Salah satu sudut lokasi tambang terbuka PT Freeportdi Grasberg Tembagapura yang berada di atas ketinggian 4000 meter yang membentang luas dan kedalaman hingga puluhan kilometer, sehingga setiap hari, pasir limbah tambang *(tailing)* dibuang melalui aliran sungai ke pesisir selatan Papua.
Foto: Muhammad Yamin.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kajian cepat ini bertujuan untuk menguji asumsi dasar apakah benar di balik setiap rangkaian kekerasan militer selalu terselip kepentingan ekonomi? Asumsi tersebut kemudian diuji dengan tiga cara yakni:

1. Mengidentifikasi penempatan militer di Papua berdasarkan keberadaan pos/kantor militer;
2. Mengidentifikasi sebaran konsesi di sekitar pos-pos militer tersebut; dan
3. Mencari keterhubungan antara keberadaan konsesi perusahaan dengan militer (TNI-POLRI) Indonesia.

Lingkup spasial dalam kajian cepat kali ini ialah salah satu kabupaten yang terletak di Pegunungan Tengah, Kabupaten Intan Jaya. Beberapa tahun terakhir, eskalasi konflik yang melibatkan TNI dengan TPNPB di Intan Jaya memang meningkat. Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia berencana akan menambah jumlah pasukan dan menggelar operasi militer. Pemerintah berdalih bahwa itu dilakukan guna mempertahankan NKRI dan menumpas kelompok kriminal bersenjata.

Terkait penempatan militer, kajian cepat ini mencatat bahwa ada sejumlah 4 pos militer (TNI-POLRI) di Kabupaten Intan Jaya yakni Polsek Sugapa, Polres Intan Jaya, Kodim Persiapan Intan Jaya, dan Koramil Persiapan Hitadipa. Polres Intan Jaya baru berdiri pada 2019, sementara Koramil Persiapan Hitadipa pada 2020. Keberadaan pasukan militer di Intan Jaya ada di pos-pos militer tersebut. Selain prajurit organik di pos-pos militer tersebut, pada 2021 ada pula penambahan pasukan militer di Intan Jaya melalui Operasi Pengamanan Konflik Sosial (18 Februari - 31 Agustus 2021) sejumlah 100 anggota POLRI. Kajian cepat ini tidak dapat merinci berapa sebenarnya prajurit militer (TNI-POLRI) yang ada di pos-pos tersebut dan berapa prajurit tambahan yang dikirim ke Intan Jaya untuk berbagai tujuan. Faktor terbesarnya karena ketertutupan informasi resmi dari militer itu sendiri.

Kajian cepat ini juga mengidentifikasi empat konsesi perusahaan yang terletak di kecamatan/distrik yang terdapat pos militer. Keempat perusahaan tersebut bergerak di sektor tambang yakni PT Freeport Indonesia dan/atau PT ANTAM; PT Madinah Qurrata 'Ain; PT Nusapati Satria; dan PT Kotabara Mitratama. Selain berlokasi dekat dengan Jalan Trans-Papua, pos-pos militer di Intan Jaya juga berdekatan dengan keempat konsesi perusahaan tersebut.

Dua perusahaan tambang tidak terindikasi memiliki hubungan dengan militer. **Sementara dua perusahaan lainnya, PT Freeport Indonesia dan/atau PT ANTAM (Blok Wabu) dan PT Madinah Qurrata 'Ain, teridentifikasi memiliki keterkaitan erat dengan militer. Di kedua perusahaan tersebut banyak ditemukan purnawirawan dan prajurit aktif (TNI-POLRI) yang**

Dua perusahaan teridentifikasi memiliki keterkaitan erat dengan militer. Di kedua perusahaan tersebut banyak ditemukan purnawirawan dan prajurit aktif (TNI-POLRI) yang duduk sebagai komisaris atau menjadi salah satu pemegang saham.

Suku Wambon, Papua terus berkomitmen menjaga tanah/hutan adat meski di saat pandemi. Foto: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

duduk sebagai komisaris atau menjadi salah satu pemegang saham.

Keberadaan para purnawirawan dan prajurit militer aktif di perusahaan merupakan bentuk kaki kedua bisnis militer. Keberadaan mereka potensial membuat aktivitas pengerukan sumber daya alam yang akan dan/atau sudah dilakukan perusahaan menjadi lebih aman. Masyarakat sekitar konsesi perusahaan menjadi takut bersuara, karena acap berhadapan langsung dengan aparat militer sebagai penjaga perusahaan. Di samping itu, beberapa nama purnawirawan bahkan teridentifikasi pula merupakan anggota tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo. Relasi tersebut potensial membuat urusan perizinan perusahaan menjadi lebih mudah.

Temuan adanya praktik bisnis militer kaki kedua di Intan Jaya menyingkap adanya potensi kepentingan ekonomi di balik serangkaian "operasi militer ilegal" di Intan Jaya. Kajian cepat ini menganggap semua operasi atau pengiriman pasukan sebagai tindakan ilegal karena sampai saat ini, presiden belum mengeluarkan Keputusan Presiden yang disetujui DPR RI sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dalam konteks ini, ketiadaan instruksi resmi tersebut makin memperjelas indikasi bahwa pengiriman pasukan dan operasi militer di Intan Jaya memang tidak semata soal penumpasan kelompok bersenjata, namun justru soal kepentingan ekonomi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di satu sisi ada kepentingan ekonomi perusahaan dan militer yang terselip dari serangkaian kekerasan di Intan Jaya. Di sisi lainnya, ada masyarakat sipil Papua yang menjadi korban berlipat-lipat: (1) mereka menjadi korban konflik bersenjata antara militer dengan TPNPB. Beberapa di antaranya sampai harus mengungsi, bahkan meregang nyawa; (2) mereka juga menjadi korban industri pertambangan ekstraktif yang mengeruk habis kekayaan alam di tanah tempat dia lahir. **Karena itu, sekali lagi, apakah benar operasi militer (ilegal) ke Tanah Papua merupakan bagian dari upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?**

REKOMENDASI

Temuan dalam kajian cepat ini mengimplikasikan beberapa hal, antara lain:

1. Pemerintah pusat perlu menarik seluruh anggota keamanan TNI/POLRI yang diturunkan secara non-organik di Tanah Papua.
2. Pemerintah perlu menindak tegas aparat militer yang melakukan pelanggaran HAM.
3. Pemerintah harus mencabut perizinan perusahaan yang tidak mendapat persetujuan dari masyarakat lokal.
4. Pemerintah pusat dan daerah harus mengutamakan keselamatan dan kedamaian di Intan Jaya dengan mengupayakan pelayanan sosial yang baik.
5. Pemerintah harus segera meninggalkan pendekatan militer dalam setiap kebijakan yang menyangkut Tanah Papua.
6. Pemerintah (dalam hal ini BUMN) harus menimbang ulang pilihan untuk menempatkan militer di kursi komisaris. Sebab, hal ini justru potensial memperparah praktik bisnis militer dan memperkeruh eskalasi konflik kekerasan yang sebenarnya berakar dari ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik di Tanah Papua. ✪

DAFTAR PUSTAKA

Adeeb, Maryam. (2019, 16 Agustus). "West Wits to Dilute Derewo River Gold Project Stake to 10%". Spyglobal.com. Diakses pada 10 Juli 2021, dari https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/trending/h83XV_d8YsnCvutsor71Sw2.

Aditjondro, George Junus. "Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang Siap Meledak: Ekonomi Politik Bisnis Tentara di Tanah Papua". Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif XVII/2004.

Adyatama, Egi. (2020, Oktober 29). "Konflik TNI-KKB, Masyarakat Intan Jaya Mengungsi dan Trauma". Tempo.co. Diakses pada 19 Juli 2021, dari https://nasional.tempo.co/read/1400531/konflik-tni-kkb-masyarakat-intan-jaya-banyak-mengungsi-dan-trauma/full&view=ok.

Anonim. (2019, Januari 30). "Menanggung Dampak Limbah Freeport". Tempo.co. Diakses pada 19 Juli 2021, dari https://kolom.tempo.co/read/1169527/menanggung-dampak-limbah-freeport/full&view=ok

Anonim. (2019, September 28). "Di Wilayah Korem 173/PVB, 4 Kodim Baru Akan Dibentuk". Cenderawasihpos.co.id. Diakses pada 5 Juli 2021, dari http://cenderawasihpos.co.id/di-wilayah-korem-173-pvb-4-kodim-baru-akan-dibentuk/.

Anonim. (2020, Juni). "Ir. Sahat P. Pasaribu, M.Pdk Tokoh Masyarakat yang Visioner, Peduli dan Cerdas". Narwastu.id. Diakses pada 21 Juli 2021, dari https://www.narwastu.id/2020/06/ir-sahat-p-pasaribu-m-pdk-tokoh-masyarakat-yang-visioner-peduli-dan-cerdas.php.

Belau, Arnold. (2021, 08 Februari). "Breaking News: TPNPB Tembak Satu Orang di Bilogai, Intan Jaya". Suarapapua.com. Diakses pada 16 Juli 2021, dari https://suarapapua.com/2021/02/08/breaking-news-tpnpb-tembak-satu-orang-di-bilogai-intan-jaya/.

Belau, Arnold. (2021, 14 Maret). "Victor Yeimo: Dalam Tiga Tahun Negara Sudah Kirim 21 Ribu Anggota ke Papua". Suarapapua.com. Diakses pada 22 Juni 2021, dari https://suarapapua.com/2021/03/14/victor-yeimo-dalam-tiga-tahun-negara-sudah-kirim-21-ribu-anggota-ke-papua/

Briantika, Adi. (2020, September 22). "Kematian Pendeta Yeremia: Cari Pembunuh Tentara, Warga Ditembak". Tirto.id. Diakses pada 20 Juni 2021, dari https://tirto.id/kematian-pendeta-yeremia-cari-pembunuh-tentara-warga-ditembak-f4YE.

CNN Indonesia. (2020, Desember 24). "Oknum TNI Buang Abu Jenazah Zanambani Bersaudara ke Sungai". Cnnindonesia.com. Diakses pada 17 Juni 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201223185907-12-585831/oknum-tni-buang-abu-jenazah-zanambani-bersaudara-ke-sungai.

CNN Indonesia. (2020, September 20). "TNI Sebut Pendeta Tewas Ditembak KKB Papua".Cnnindonesia.com. Diakses pada 20 Juni 2021, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200920144515-12-548604/tni-sebut-pendeta-tewas-ditembak-kkb-papua.

Emanuel Gobay & Johnny T. Wakum. 2020. Pendokumentasian Kasus Pelanggaran HAM Berat dari Tahun 2018-2020. LBH Papua-YLBHI.

Greenpeace International. 2021. Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua (terj.). Amsterdam: Greenpeace International.

Gunadha, Reza. (2020, April 15). "Dua Warga Papua Ditembak Mati Aparat Saat Mancing Ikan, Satu Mahasiswa UMN". Suara.com. Diakses pada 19 Juli 2021, dari https://www.suara.com/news/2020/04/15/181107/dua-warga-papua-ditembak-mati-aparat-saat-mancing-ikan-satu-mahasiswa-umn?page=all.

Ishak, Otto Syamsuddin. "Ganja Aceh dan Serdadu Indonesia Dalam Periode Perang Aceh 1989-2003". Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif XVII/2004.

Jubi.co.id. (2020, Oktober 27). "Administrator Diosesan Keuskupan Timika: Rufinus Tigau Adalah Katekis di Paroki Jalae Timika". Jubi.co.id. Diakses pada 27 Juni 2021, dari https://jubi.co.id/papua-rufinus-tigau-katekis-di-paroki-jalae-timika/.

Jubi.co.id. (2021, Februari 3). "Konflik Intan Jaya (7): Ketegasan Dijawab Permusuhan". Jubi.co.id. Diakses pada 20 Juni 2021, dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-7-ketegasan-dijawab-permusuhan/.

Jubi.co.id. (2021, Januari 28). "Konflik Intan Jaya (6): Kronik Kekerasan di Intan Jaya". Jubi.co.id. Diakses pada 20 Juni 2021, dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-6-kronik-kekerasan-di-intan-jaya/.

Kirksey, S. Eben & Kiki van Bilsen. "A Road to Freedom: Mee Articulations and The Trans Papua Highway". Diakses pada 13 Juli 2021 dari http://www.kitlv-journals.nl/.

Kumparan. (2019, 23 Agustus). "Bravo-5 dan Cakra 19, Pasukan Jenderal Purn TNI di Belakang Jokowi". Kumparan.com. Diakses pada 21 Juli 2021, dari https://kumparan.com/kumparannews/bravo-5-dan-cakra-19-pasukan-jenderal-purn-tni-di-belakang-jokowi-1534995728310430493/full.

Lantipo, Yuliana. (2020, Oktober 7). "Seorang Pewarta Gereja Tertembak di Intan Jaya, Papua". Jubi.co.id. Diakses pada 17 Juni 2021, dari https://jubi.co.id/seorang-pewarta-gereja-tertembak-di-intan-jaya-papua/.

Lesmana, Agung Sandy & Ria Rizki Nirmala Sari. (2021, 29 April). "Dicap Teroris, Mahfud MD Minta TNI-POLRI Tumpas Habis TPNPB Sesuai Hukum". Suara.com. Diakses pada 17 Juli 2021, dari https://www.suara.com/news/2021/04/29/144528/dicap-teroris-mahfud-md-minta-tni-polri-tumpas-habis-tpnpb-sesuai-hukum?page=all.

Malik, Ichsan. "Bisnis Militer di Wilayah Konflik Maluku". Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif XVII/2004.

Mambor, Victor. (2020, 26 Desember). "Konflik Intan Jaya (1): Resiko Kekerasan yang Lebih Meluas di Masa Mendatang". Jubi.co.id. Diakses pada 13 Juli 2021, dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-i-resiko-kekerasan-yang-lebih-meluas-di-masa-mendatang/.

Mambor, Victor. (2020, Desember 28). "Konflik Intan Jaya (2): Kekerasan yang Mengorbankan Warga Sipil". Jubi.co.id. Diakses pada 20 Juni 2021, dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-papua-2-kekerasan-yang-meluas-dan-mengorbankan-warga-sipil/.

Mambor, Victor. (2020, November 2). "Keuskupan Timika Rilis Kronologis Penembakan Rufinus Tigau, Katekis dari Paroki Bilogai". Jubi.co.id. Diakses pada 27 Juni 2021, dari https://jubi.co.id/keuskupan-timika-rilis-kronologis-penembakan-rufinus-tigau-katekis-dari-paroki-bilogai/.

Mambor, Victor. (2021, 09 Januari). "Konflik Intan Jaya (4): Gunung Emas di Sugapa dan Topografi Konflik Papua". Jubi.co.id. Diakses pada 13 Juli 2021, dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-4-gunung-emas-di-sugapa-dan-topografi-konflik-papua/.

Mambor, Victor. (2021, Februari 16). "Tiga Warga Intan Jaya Tewas, Diduga Akibat Kekerasan Anggota TNI". Jubi.co.id. Diakses pada 18 Juni 2021, dari https://jubi.co.id/tiga-orang-warga-intan-jaya-papua-tewas-diduga-akibat-kekerasan-anggota-tni/.

Mambor, Victor. (2021, Januari 17). "Konflik Intan Jaya (5): Konflik Bersenjata Baru yang Mematikan". Jubi.co.id. Diakses pada 20 Juni 2021, dari https://jubi.co.id/konflik-intan-jaya-5-konflik-bersenjata-baru-yang-mematikan/.

Maulana, Riezky. (2021, 22 Januari). "Baku Tembak Dengan KKB di Intan Jaya, Dua Prajurit TNI Gugur". Nasional.sindonews.com. Diakses pada 5 Juli 2021, dari https://nasional.sindonews.com/read/310478/14/baku-tembak-dengan-kkb-di-intan-jaya-dua-prajurit-tni-gugur-1611309708.

Mawel, Benny. (2021, 1 April). "PAHAM dan KontraS Papua Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 63 Kasus Kekerasan". Jubi.co.id. Diakses pada 17 Juli 2021, dari https://jubi.co.id/paham-dan-kontras-papua-sebut-sepanjang-2020-terjadi-63-kasus-kekerasan/.

Montesori, Jeis. (2016, Maret 17). "Pencurian Emas Sungai Degeuwo di Papua Rugikan Negara Triliunan". Beritasatu.com. Diakses pada 12 Juli 2021, dari https://www.beritasatu.com/nasional/355269/pencurian-emas-sungai-degeuwo-di-papua-rugikan-negara-triliunan.

Nurita, Dewi Dkk. "Tak Bulat Memberi Cap Teroris". Koran Tempo 30 April 2021.

Pademme, Arjuna. (2015, 26 Oktober). "Demi Emas di Papua, Perusahaan Halalkan Segala Cara". Jubi.co.id. Diakses pada 21 Juli 2021, dari https://jubi.co.id/demi-emas-di-papua-perusahaan-halalkan-segala-cara/.

Pademme, Arjuna. (2021, 12 Maret). "DPR Papua: Sulit Mencari Tahu Jumlah Pasukan Non Organic di Papua". Jubi.co.id. Diakses pada 22 Juli 2021, dari https://jubi.co.id/sulit-mencari-tahu-jumlah-pasukan-non-organik-di-papua/.

Pakiding, Sevianto. (2021, Januari 6). "Apa Kabar Kasus Pembunuhan Pdt. Yeremia dan Pewarta Gereja Katolik di Sugapa?". Seputarpapua.com. Diakses pada 17 Juni 2021, dari https://seputarpapua.com/view/apa-kabar-kasus-pembunuhan-pdt-yeremia-dan-pewarta-gereja-katolik-di-sugapa.html/4.

Pontoh, Coen Husain. "Bedil, Amis Darah, dan Mesiu Mengurai Keterlibatan Militer dalam Konflik Ambon". Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif XVII/2004.

Pusaka. (2016, Maret). "Peta Konsesi Pertambangan Minerba di Kabupaten Intan Jaya, Prov. Papua". Pusaka.or.id. Diakses pada 22 Juli 2021, dari https://pusaka.or.id/2016/03/peta-konsesi-pertambangan-minerba-di-kabupaten-intan-jaya-prov-papua/.

Puspitasari, Maya Ayu, "Bersiaga di Penjuru Papua", Koran Tempo 01 Mei 2021.

Rahma, Anindita Dkk. "Ancang-Ancang Operasi Militer di Papua". Koran Tempo 28 April 2021.

Santoso, Aris. (2013, 26 Februari). "Pasukan Organik dan Non-Organik Bertemu di Papua". Kbr.id. Diakses pada 22 Juli 2021, dari https://kbr.id/nusantara/0S2-2013/pasukan_organik_dan_non_organik_bertemu_di_papua/65265.html.

Santoso, Audrey. (2021, 09 Maret). "2 Kapal Perang Bersandar di Jayapura, Turunkan 1.350 Prajurit TNI". News.detik.com. Diakses pada 22 Juni 2021, dari https://news.detik.com/berita/d-5486929/2-kapal-perang-bersandar-di-jayapura-turunkan-1350-prajurit-tni.

Staf Publikasi dan Informasi Yayasan Pusaka. (2014, Juni). "Selayang Pandang Tambang Degeuwo Papua". Pusaka.or.id. Diakses pada 13 Juli 2021, dari https://pusaka.or.id/2014/06/selayang-pandang-tambang-degeuwo-papua/.

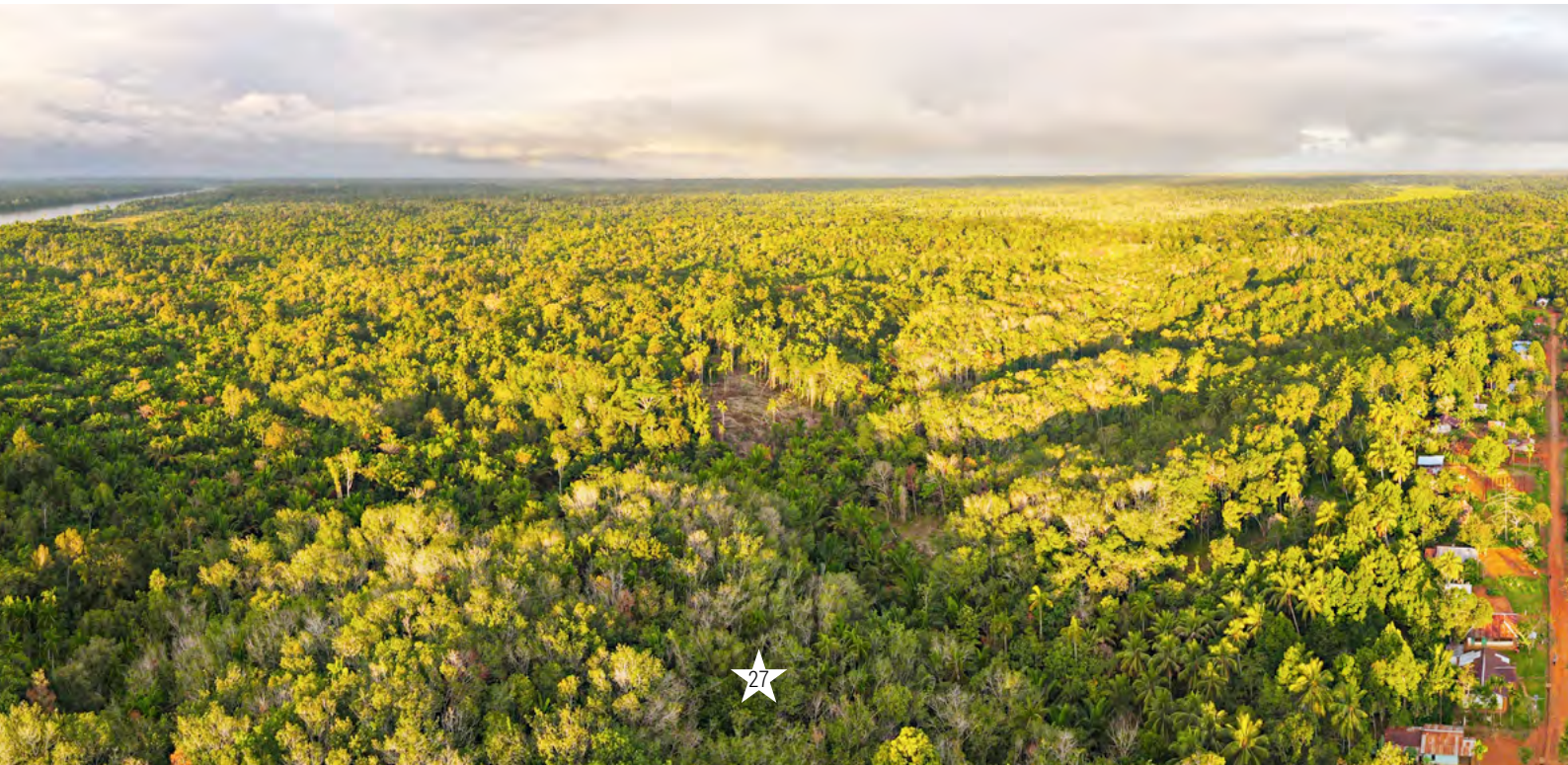

Supriatma, A.M.T. "TNI/POLRI in West Papua: How Security Reforms Work in the Conflict Regions". Indonesia No. 95 (April 2013).

Taher, Andrian Pratama. (2020, November 12). "8 Personel TNI Tersangka Pembakaran Rumah Dinas Kesehatan Hitadipa". Tirto.id. Diakses pada 22 Juni 2021, dari https://tirto.id/8-personel-tni-tersangka-pembakaran-rumah-dinas-kesehatan-hitadipa-f6Wg.

Taher, Andrian Pratama. (2021, Februari 15). "Konflik Berulang di Intan Jaya Papua karena Pendekatan Militeristik". Tirto.id. Diakses pada 7 Juli 2021, dari https://tirto.id/konflik-berulang-di-intan-jaya-papua-karena-pendekatan-militeristik-gaeC.

Tim Peneliti. 2021. Analisis Pengaruh Rencana Pembangunan Major Project Jalan Trans-Papua terhadap Aspek Sosial-Ekologis Papua. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Umah, Anisatul & Monica Wareza. (2020, 12 Juni). "Rangkul TNI Hingga POLRI di BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir". Cnbcindonesia.com. Diakses pada 22 Juli 2021, dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20200612141332-17-164941/rangkul-tni-hingga-polri-di-bumn-ini-jawaban-erick-thohir.

Utomo, Samiyo. (2011, 09 November). "Gagal Menjadi Montir Mesin, Malah Jadi Pengusaha yang Sukses". Alumni.upnyk.ac.id. Diakses pada 21 Juli 2021, dari http://alumni.upnyk.ac.id/index.php/blog/2011/11/gagal-menjadi-montir-mesin-malah-jadi-pengusaha-yang-sukses.-i.

West Wits Mining. (2015, 30 Oktober). "ASX Announcement and Media Release (Friday, 30 October 2015)". Diakses pada 21 Juli 2021, dari https://westwitsmining.com/.

West Wits Mining. (2016, 12 Oktober). "ASX Announcement and Media Release (Wednesday, 12 October 2016)". Diakses pada 21 Juli 2021, dari https://westwitsmining.com/.

You, Abeth. (2020, Oktober 13). "Keuskupan Timika Minta Gubernur Papua Cabut Rekomendasi WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya". Jubi.co.id. Diakses pada 19 Juli 2021, dari https://jubi.co.id/keuskupan-timika-minta-gubernur-papua-cabut-rekomendasi-wiupk-blok-wabu-di-intan-jaya/.

You, Abeth. (2021, Juni 29). "P2MA-PTP Tolak Penambangan Emas di Blok Wabu". Jubi.co.id. Diakses pada 19 Juli 2021, dari https://jubi.co.id/p2ma-ptp-tolak-penambangan-emas-di-blok-wabu/.

You, Markus. (2020, November 7). "Rakyat Papua Tolak Investor Eksploitasi Blok B Wabu Intan Jaya". Suarapapua.com. Diakses pada 19 Juli 2021, dari https://suarapapua.com/2020/11/07/rakyat-papua-tolak-investor-eksploitasi-blok-b-wabu-intan-jaya/.

Yurike. (2020, 03 Februari). "Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi Resmi Mendeklarasikan Ormas Pejuang Bravo Lima (PBL)". Sorotjakarta.com. Diakses pada 21 Juli 2021, dari https://sorotjakarta.com/2020/02/03/jendral-tni-purn-fachrul-razi-resmi-mendeklarasikan-ormas-pejuang-bravo-limapbl/.

Tampak atas konsesi PT Merauke Rayon Jaya 2 Oktober 2020. Foto: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Lampiran 1
Tabel Sebaran Pos Keamanan di Pegunungan Tengah

KANTOR MILITER	TAHUN	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
Polsek Sugapa	0	SUGAPA	INTAN JAYA
Polres Intan Jaya	2019		
Kodim Persiapan Intan Jaya	0		
Koramil Persiapan Hitadipa	2020	HITADIPA	
Polsek Agimuga	0	AGIMUGA	MIMIKA
Koramil 1710-06/Agimuga	0		
Koramil 1710-05/Jila	0	JILA	
Polsek Kuala Kencana	0	KUALA KENCANA	
Koramil 1710-03/Kuala Kencana	0		
Yonif 754/Eme Neme Kangasi	2004		
Koramil 1710-01/Kokonao	0	MIMIKA BARAT	
Kodim 1710/Mimika	0		
Polsek Mimika Baru	0	MIMIKA BARU	
Polsek Kwamki Narama	0		
Polres Mimika	0		
Koramil 1710-02/Timika	0		
Polsek Mimika Timur	0	MIMIKA TIMUR	
Koramil 1710-07/Mapurujaya	0		
Brigif 20/Ima Jaya Keramo	2007		
Polsek Tembagapura	0	TEMBAGAPURA	
Koramil 1710-04/Tembagapura	0		
Polsek Kenyam	0	KENYAM	NDUGA
Polres Nduga	2020		
Koramil 1715-07/Kenyam	2020		
Koramil 1714-05/Beoga	0	BEOGA	PUNCAK
Pos Koramil Persiapan Hitadipa	0	GOME	
Polsek Beoga	0		
Polsek Ilaga	0	ILAGA	
Polres Puncak	2020		
Kodim Persiapan Puncak	0		
Koramil 1714-03/Ilaga	0		
Polsek Sinak	0	SINAK	
Koramil 1714-04/Sinak	0		
Polsek Ilu	0	ILU	PUNCAK JAYA
Koramil 1714-02/Ilu	0		
Polsek Mulia	0	MULIA	
Polres Puncak Jaya	2013		
Koramil 1714-01/Mulia	0		
Kodim 1714/Puncak Jaya	2013		
Pospol Tingginambut	0	TINGGINAMBUT	
Posramil 1714-06/Tingginambut	0		

Lampiran 2
Data Korban Penembakan dan Penganiayaan Akibat Konflik Bersenjata TNI/ POLRI dan TPNPB di Intan Jaya Selama Januari 2020 Hingga Maret 2021

NO.	TANGGAL	NAMA KORBAN	LOKASI	KETERANGAN
01.	26-01-20	Alex Kobogau	Kampung Ologotugapa, Sugapa	Warga sipil. Meninggal.
02.	26-01-20	Jakson Sondegau (8)	Dekat Markas Koramil Yokatapa Sugapa	Warga Sipil. Masih hidup.
03.	26-01-21	Yopi Sani Yegeseni (14)	Yokatapa	Masih hidup.
04.	18-02-20	Melki Tipagau (12)	Kampung Gulanggama dan Japaro Komplek	Warga Sipil. Meninggal.
05.	18-02-20	Kayus Sani	Kampung Gulanggama dan Japaro Komplek	Warga Sipil. Meninggal.
06.	18-02-20	Heletina Sani	Kampung Gulanggama dan Japaro Komplek	Warga Sipil. Masih hidup.
07.	18-02-20	Malopina Sani (11)	Kampung Gulanggama dan Japaro Komplek	Warga Sipil. Masih hidup.
08.	21-04-20	Luther Zanambani	Distrik Hitadipa	Warga Sipil. Meninggal.
09.	21-04-20	Apinus Zanambani	Distrik Hitadipa	Warga Sipil. Meninggal.
10.	22-05-20	Heniko Somou	Kampung Kititapa, Distrik Wandai	Warga Sipil. Meninggal.
11.	22-05-20	Alemanek Bagau	Kampung Kititapa, Distrik Wandai	Warga Sipil. Masih hidup.
12.	29-05-20	Yunus Sani	Kampung Mbugulo Distrik Wandai	Warga Sipil. Meninggal.
13.	14-09-20	La Ode Anas Munawir	Bilogai, Distrik Sugapa	Warga Sipil. Masih hidup.
14.	14-09-20	Fathur Rahman	Distrik Sugapa	Warga Sipil. Masih hidup.
15.	17-09-20	Ahmad Baidlowi	Distrik Sugapa	Warga Sipil. Meninggal.
16.	17-09-20	Serka Sahlan	Sugapa ke Hitadipa	Anggota TNI. Meninggal.
17.	19-09-20	Pratu Dwi Akbar Utomo	Distrik Hitadipa	Anggota TNI. Meninggal.
18.	19-09-20	Yeremia Zanambani	Distrik Hitadipa	Warga Sipil. Meninggal.
19.	07-10-20	Agustinus Duwitau	Distrik Sugapa	Warga Sipil. Masih hidup.
20.	07-11-20	Pratu Firdaus	Pos Titigi	Anggota TNI. Meninggal.
21.	26-10-20	Rufinus Tigau	Kampung Jalai	Meninggal.
22.	26-10-20	Meinus Bagubau (12)	Kampung Jalai	Warga Sipil. Masih Hidup.
23.	07-11-20	Prada Agus Kurniawan	Pos Titigi	Anggota TNI. Meninggal.
24.	22-01-21	Pratu Roy Vebrianto	Sugapa-Hitadipa	Anggota TNI. Meninggal.
25.	22-01-21	Pratu Dedi Hamdani	Pos Titigi	Anggota TNI. Meninggal.
26.	03-02-21	Peria Mirib	Distrik Hitadipa	Anggota TPNPB. Meninggal.
27.	08-02-21	Penjaga Kios	Kampung Bilogai, Distrik Sugapa	Warga Sipil. Meninggal.
28.	12-02-21	Praka Hendra Sipayung	Kampung Mamba Distrik Sugapa	Anggota TNI. Masih hidup.
29.	15-02-21	Prada Ginanjar Arianda	Kampung Mamba Distrik Sugapa	Anggota TNI. Meninggal.
30.	15-02-21	Janius Bagau	Kampung Amaesiga dan Puskesmas Bilogai	Warga Sipil. Meninggal.
31.	15-02-21	Justinus Bagau	Puskesmas Bilogai	Warga Sipil. Meninggal.
32.	15-02-21	Soni Bagau	Puskesmas Bilogai	Warga Sipil. Meninggal.
33	28-02-21	Satu Anggota KKB	Distrik Hitadipa	TPNPB Meninggal.
34.	06-03-21	Melianus Nayagau	Kampung Puyagia Distrik Sugapa	Warga Sipil. Meninggal.

TIM STUDI:
Ode Rakhman, Umi Ma'rufah, Bagas Yusuf Kausan, Ardi

KONTRIBUTOR:
Asfinawati, Muhammad Isnur, Ahmad Fauzi, Wahyu Perdana, Rivanlee Anandar, Fatia Maulidiyanti, Asep Komaruddin, Rio Rompas, Iqbal Damanik, Ahmad Saini, Tigor Hutapea, Wirya Supriyadi, Emanuel Gobay, Ahmad Ashov Birry, Merah Johansyah.

PENANGGUNGJAWAB & PENERBIT:
#BersihkanIndonesia
YLBHI
WALHI Eksekutif Nasional
Pusaka Bentara Rakyat
WALHI Papua
LBH Papua
KontraS
JATAM
Greenpeace Indonesia
Trend Asia

TATA LETAK & DESAIN:
Kakiketjil